

BICARA BENCANA

EDISI AGUSTUS 2024





Bukan gempa bumi dan
tsunami yang membunuh.
Tapi ketidaktahuan dan sikap
tidak peduli kita.

AHMAD ARIEF
PENULIS & JURNALIS BENCANA



Seluruh teks © 2024 Judul Buletin berlisensi di bawah Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

PIMPINAN REDAKSI

Muhammad Rizki

KONTRIBUTOR

Aneu Damayanti, Annisa Inayah, Astried Permata, Domi Djaga, Elliah Ayu, Firdaus HR, Kifu, Rehann, Muhammad Rizki, N. Aidawardhani, Nabila Auliani Ruray, Nafilah Safitri, Rifka Dyah Safitri, Teliana Juwita, Titah AW, Umar Nashih Ulwan

PENYUNTING

Nabila Auliani Ruray, Wilsa Naomi

ILUSTRASI & TATA LETAK

Mohammad Nur Fiqri

Ditulis dan diterbitkan oleh:



PAMFLET

Perkumpulan Pamflet Generasi

Komplek Buncit Indah

Jalan Mimosa IV Blok E No. 17, Pejaten Barat

Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, Indonesia

www.pamflet.or.id

email: pamfletindonesia@gmail.com

Daftar Isi

BULETIN BICARA BENCANA
EDISI AGUSTUS 2024

02

KATA
PENGANTAR

05

NABILA AULIANI RURAY
Bencana, Dekat di
Mata Jauh di Hati

12

MUHAMMAD RIZKI
Memori
Bencana

20

RIFKA DYAH SAFITRI
Grobogan Rumahku,
Aku Sayang Tapi Pilu

26

N. AIDAWARDHANI
Merapi Marah -
Komik Strip

30

UMAR NASHIH ULWAN
Bilik Cinta di
Pengungsian

35

ANNISA INAYAH
Kiamatnya Pemukiman
Padat

41

ELIAH AYU APRIANTI
Asap Hitam yang
Mengepung
Lingkunganku

47

ASTRIED PERMATA
Pandemi COVID-19 :
Hidup-Mati Masyarakat
di Tangan Pasar

56

REHANN
Pluit Sangkakala di
Stadion Bola

64

KIFU
In The Red Zone -
Foto Seri

73

TITAH AW
Alam yang Riu,
Alam yang Bersuara

78

ANEU DAMAYANTI
Siasat Nenek Moyang
yang Ditinggalkan di
Negeri Gempa

83

TELIANA JUWITA
Depok
Kota Petir

88

NAFILAH SAFITRI
Mencegah Potensi Bencana
dengan Pariwisata
Berkelanjutan

94

DOMI DJAGA
Seusai Bencana,
Seuntai Upaya

100

FIRDAUS HR
Memetakan Risiko Bencana,
Bisa Mulai dari Mana?

108

PROFIL
KONTRIBUTOR

Kata Pengantar

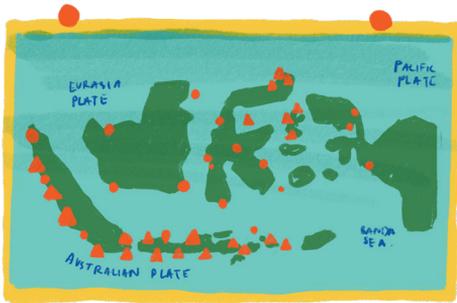
Bicara tentang hak orang muda juga harus turut berbicara tentang hak hidup yang layak. Beberapa waktu ke belakang, Pamflet sebagai organisasi youth-led yang berfokus pada isu orang muda, sangat gelisah melihat keadaan krisis iklim yang membuat kualitas hidup semua orang terganggu.

Young people are the least to blame for climate change – and the most vulnerable to its effects.

– Barford (pada World Economic Forum), 2021

Peran orang muda untuk turut terlibat pada diskursus lingkungan menjadi penting, bukan hanya untuk memenuhi kuota namun juga karena kini hajat hidupnya yang dipengaruhi. Dengan semangat mendorong lebih banyak orang muda terlibat pada simpul-simpul gerakan sosial di isu lingkungan, Pamflet setia merawat diskusi dan kolaborasi dengan jejaring, komunitas, dan kolektif orang muda di seluruh penjuru Indonesia.

Pada buletin kali ini, kami mencoba mengambil satu subtopik kecil dari isu lingkungan: bencana. Namun sialnya, bicara bencana seperti membuka kotak pandora yang memunculkan lebih banyak tanda tanya dan kegelisahan. Tidak hanya bertemu dengan bencana karena alam yang menjadi pemahaman kami selama ini, tetapi juga bencana-bencana buatan manusia yang terjadi di waktu dan tempat tidak terduga. Melalui proses inilah kami menyadari bahwa jarak antara orang muda dengan diskusi kebencanaan



masih cukup besar. Padahal, sama seperti isu krisis iklim lainnya, orang muda akan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak bencana.

Buletin ini tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi jawaban atas kegelisahan pembaca mengenai bencana. Alih-alih, membaca tulisan yang dirangkai pada “Bicara Bencana” ini mungkin akan membuatmu turut merasakan perjalanan Pamflet dalam memaknai ulang kata bencana. Bencana bukan hanya sekedar kejadian dan dampaknya, tetapi hasil diskusi kami dengan Ahmad Arif (Penulis/Jurnalis Bencana) dan teman-teman dari U-INSPIRE menunjukkan bahwa mitigasi risiko menjadi poin penting untuk selalu dibahas.

Perjalanan kami dengan kata bencana telah menguatkan komitmen Pamflet untuk memicu lebih banyak “keramaian” pada isu bencana dan isu lingkungan kedepannya. Semoga, tulisan ini juga dapat menggugahmu untuk turut menjaga “keramaian” yang sama di sekitarmu.

Selamat kembali memaknai kata bencana!



Bencana,

Dekat di Mata Jauh di Hati

OLEH
**NABILA
AULIANI
RURAY**

Kupikir berbicara tentang bencana adalah berbicara soal tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung api. Ketika pertama kali mendengar seorang kolega mengusulkan bencana sebagai isu yang bisa ditelusuri dalam buletin terbaru Pamflet, aku pun dilanda kebingungan. Meski aku punya pengalaman menubuh terkait gempa, entah kenapa topik bencana terkesan begitu jauh di benakku.

Adanya jarak antara isu bencana dengan isu-isu lainnya diamini para praktisi seputar isu bencana. Patterson dan McDougal, dalam tulisan mereka yang dirilis *The New Humanitarian*, menyatakan bahwa Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sedari dulu seolah menjadi “anak tiri” yang terasingkan di tengah “keluarga” pembangunan. “Saking pengurangan risiko bencana sangat tidak *Instagramable*, bahkan UNDRR tidak memiliki akun Instagram,” ungkap Patterson dan McDougal (2021). Berangkat dari konteks isu bencana yang seolah berjarak, aku berupaya merekam prosesku berkenalan dengan bencana dan PRB dalam tulisan ini.



DEFINISI DAN CAKUPAN BENCANA YANG TERNYATA LEBIH LUAS

Kebingunganku perlahan memudar setelah aku lebih menelusuri berbagai definisi dan lapisan subtopik di bawah bencana. Bencana sebagai sebuah istilah ternyata memayungi banyak peristiwa di sekitar kita. Menurut *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UNDRR), bencana terjadi ketika suatu komunitas mengalami sesuatu yang mengguncang komunitas itu, khususnya jika ada dampaknya pada manusia secara material atau ekonomi, serta pada lingkungan. Artinya, jika misalnya terjadi tsunami di pulau tak berpenghuni, kita belum bisa melabelinya sebagai bencana karena fenomena ini masih merupakan faktor risiko belaka. Tapi, jika tsunami itu menghancurkan rumah-rumah warga, menewaskan hewan-hewan, atau bahkan menimbulkan korban jiwa, barulah kita dapat menyebutnya sebagai bencana (UNDRR, n.d.).

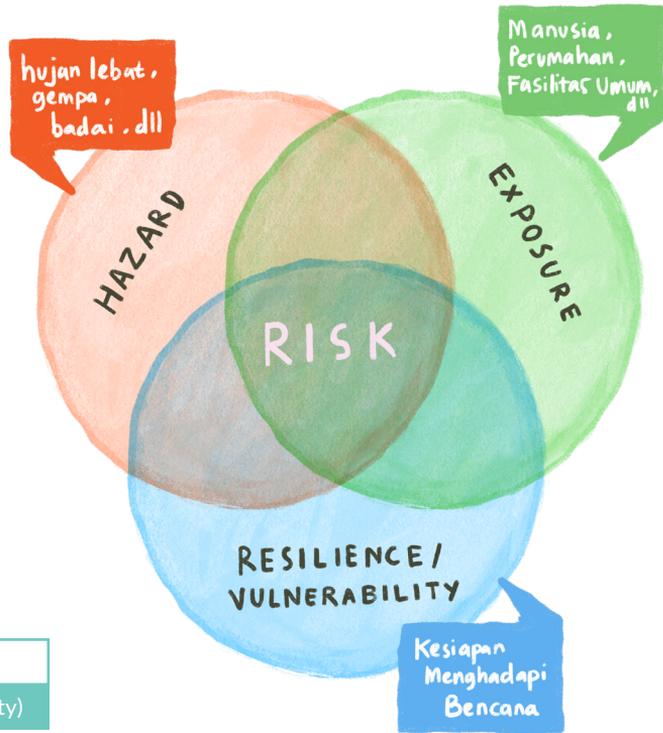
Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana juga diturunkan ke setidaknya 19 turunan, termasuk beberapa yang tidak kupikirkan sebelumnya seperti kekeringan, kecelakaan transportasi dan industri, aksi teror, dan bahkan konflik sosial serta kerusuhan (BNPB, n.d.). Ternyata asumsiku tidak salah *sih*, tapi kurang tepat karena bencana tidak melulu menyoal tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung api.



KOSAKATA BENCANA DAN ALAT MITIGASI

Guna memahami lebih jauh isu bencana, Pamflet berbincang dengan U-Inspire Indonesia, organisasi yang berisikan orang muda dalam isu resiliensi bencana dan Ahmad Arif, seorang jurnalis dan penulis yang menggiati isu bencana. Dari dua obrolan ini, ada dua benang merah yang konsisten hadir.

RESILIENCE ANALYSIS



RISK

Irisan (Hazard, Exposure, Vulnerability)

Pertama, ada beberapa kosakata mendasar dalam isu bencana yang perlu dipahami bersama, yakni ancaman, keterpaparan, dan kerentanan. Ancaman (bisa juga disebut *hazard* atau bahaya) merujuk pada kondisi atau kejadian yang berpotensi mengancam kehidupan, properti, atau lingkungan. Keterpaparan (bisa juga disebut *exposure* atau paparan) merujuk pada situasi manusia, infrastruktur, sistem, ataupun elemen lain yang kemungkinan terdampak ancaman. Kerentanan (*vulnerability*) merujuk pada faktor fisik, ekonomi,

sosial, dan lingkungan yang akan mempengaruhi bagaimana kehidupan, properti, dan lingkungan yang terpapar akan terdampak ancaman. Adapun kerentanan dilihat bersama dengan kapasitas atau kesiapan masyarakat serta infrastruktur dalam menghadapi bencana (BMKG Signature, 2023).

Seperti ilustrasi di atas, risiko bencana adalah irisan dari ketiga kata kunci. Jika diibaratkan, pengelolaan risiko itu ibarat seorang yang ingin berdansa bersama bencana. Ancaman, keterpa-



Contoh InaTews Buoy hasil rakitan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang beroperasi di Perairan Gunung Anak Krakatau (Humas BPPT via Kompas, 2021).

paran, dan kerentananlah yang menjadi gerak pinggul, tangan, dan kaki si bencana yang kemudian harus direspon dengan lugas oleh si pengelola risiko.

Kedua, percakapan dengan U-Inspire dan Ahmad Arif mengkonfirmasi bahwa bencana memang betul lebih kompleks dan berkelindan dengan banyak aspek di kehidupan kita sehari-hari. Selain PRB yang bahasa dan logikanya perlu dimengerti, isu bencana sendiri jauh lebih kaya. Salah

dua yang paling menarik adalah soal *low cost technology* dan kolonialisme.

Kawan-kawan U-Inspire bercerita mengenai upaya mereka mengembangkan *low cost technology*, alias alat-alat dengan biaya produksi seminimal mungkin yang dapat membantu mitigasi risiko bencana. Salah satunya adalah pengembangan buoy, yakni sebuah alat terapung, yang bisa memantau gelombang laut. Yang menarik dari proses pengembangan *low cost tech-*

nology ala U-Inspire bagiku adalah selain diupayakan dengan ongkos rendah dan sumber daya yang tersedia, prosesnya juga diupayakan partisipatif. Artinya, kawan-kawan U-Inspire akan datang ke sebuah lokasi, mengobrol dengan para warga setempat untuk memahami konteks lokal dan sumber daya yang tersedia, sebelum membuat alat bersama. Harapannya, warga setempat bisa mempunyai rasa kepemilikan terhadap alat tersebut dan berdaya untuk memperbaiki serta membuat kembali di kemudian hari.

Pengetahuan baru ini membuatku berpikir bahwa isu PRB ternyata mirip juga dengan apa yang kukerjakan di Pamflet, walau pintu masuknya adalah isu HAM, hak kesehatan seksual dan reproduksi, dan inklusi sosial. Entah HAM atau PRB, semua isu ini sama-sama bisa diselipkan semangat untuk perubahan sosial dengan proses yang egaliter. Kita-atau setidaknya Pamflet dan U-Inspire-sama-sama percaya akan proses yang partisipatif dan inklusif sebagai cara untuk melakukan perubahan.

PUTUSNYA PENGETAHUAN LELUHUR KARENA PENJAJAHAN

Kami juga banyak berbincang soal peran kolonialisme dalam mitigasi bencana dengan Ahmad Arif. Begini kira-kira jika cerita dari Arif dirunut ke dalam sebuah dongeng: dahulu kala, rakyat Nusantara hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Pohon, batu, gunung, laut, begitu dihormati kehadirannya. Bahkan,

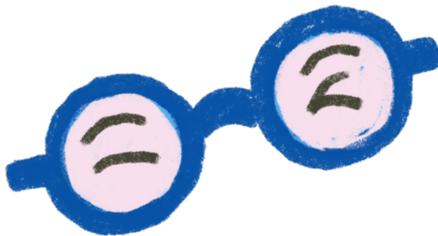
dikisahkan riwayat-riwayat mengenai alam dan penjaganya dalam berbagai versi di berbagai sudut Nusantara-sebagian berkelindan dengan bencana. Pengetahuan mengenai bencana, walau tidak seperti versi ilmu modern, juga terpatri dalam pengetahuan tradisional rakyat Nusantara. Pengetahuan bencana, misalnya, terpatri dalam arsitektur tradisional yang sebagian besar konstruksi serta desainnya dibuat sedemikian rupa agar tahan gempa. Beberapa rumah adat yang tahan gempa di sekitar kita adalah Joglo di pulau Jawa Tengah, Rumah Gadang di Sumatera Barat, Omo Sebua di Nias, hingga Rumah Kaki Seribu di Papua Barat (Jannah, 2023).

Semua berubah saat Belanda datang bersama jari-jari kolonialismenya yang mencengkram, menembus, dan mengoyak-ngoyak pengetahuan kontekstual rakyat Nusantara. Rumah-rumah mulai dibangun dengan tembok. Tembok dianggap sebagai simbol kemapuan, sementara bambu-bambu dan kayu dianggap terbelakang. Riwayat-riwayat mengenai alam dan penjaganya mulai pudar, berganti dengan ilmu-ilmu modern yang katanya lebih 'maju'.

Fenomena ini bisa terlihat di pesisir Selatan Jawa. Masyarakat pesisir Selatan Jawa dulu-dan sampai sekarang bagi sebagian-percaya akan legenda Kanjeng Ratu Kidul yang sakti dan menyeramkan, bersemayam di laut Selatan. Alhasil, warga setempat dahulu tidak ada yang hidup dan membangun rumah di dekat laut. Diceritakan kedatangan sang ratu ditandai dengan

suara yang bergemuruh dan gelombang besar, mirip sekali dengan karakteristik tsunami bukan? Ketika ditelusuri kini, daerah laut Selatan yang konon menjadi rumah Kanjeng Ratu Kidul tersebut ternyata memang rentan akan tsunami dan mempunyai sejarah tsunami.

Dengan penjajahan yang berlangsung selama 142 tahun, rakyat Nusantara turut mengalami penjajahan atas pengetahuannya, atau yang kerap disebut kolonisasi pengetahuan. Dengan kedatangan Belanda kemudian pembangunan yang abai terhadap konteks lokal merajalela, termasuk pembangunan dekat laut Selatan seperti di Cilacap, Jawa Tengah. Kesadaran bencana—serta beribu pengetahuan tradisional lainnya—terputus. Upaya pengelolaan risiko bencana terkini menjadi abai terhadap sejarahnya sendiri.



MENDEKATKAN YANG MEMANG DEKAT

Wina, salah satu anggota U-Inspire, melontarkan sebuah pertanyaan di tengah obrolan kami, “aku malah bingung ya, mengapa orang muda lebih merasa dekat dengan isu HAM, namun susah berbicara mengenai bencana?” Dalam proses singkatku berkenalan dengan isu bencana, jarak antara aku—atau orang muda lainnya, atau bahkan para praktisi PRB sendiri dan siapapun di luar sana—merupakan suatu yang tidak begitu saja hadir dalam ruang hampa. Kebingunganku didasari dari faktor-faktor dan konteks yang lebih besar dariku seperti kolonialisme, tren industri pembangunan secara global yang mengkotak-kotakkan isu ‘keren’

atau kurang keren, hingga pemerintah Indonesia yang terkesan lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan mulusnya ekonomi dibandingkan ketahanan warga di negara yang rentan bencana ini.

Adanya jarak ini juga merupakan sebuah ironi, mengingat bahwa kita tinggal di negara yang rentan akan bencana alam. Di luar bencana alam pun, isu bencana tidak seharusnya jauh karena ia sedari dulu selalu dekat dengan kehidupan sehari-hari; entah ketika harus bertahan di tengah pandemi COVID-19 kemarin, menghindari kecelakaan di jalan, mengawal konflik di lingkungan terdekat sampai genosida di Palestina, hingga dalam krisis iklim yang mengancam semua. Maka, untuk mendekatkan yang memang dekat, aku ingin menutup tulisan ini dengan mengajak kita bertanya kepada diri sendiri: apa yang bisa kulakukan untuk lebih mengenal bencana?

REFERENSI

"Definisi Bencana," Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses pada 11 Juli 2024, <https://bnpb.go.id/definisi-bencana>

"Disaster," United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Diakses pada 11 Juli 2024, <https://www.undrr.org/terminology/disaster>

"Risiko Bencana (Disaster Risk)," BMKG Signature. Diakses pada 15 Juli 2024, <https://signature.bmkg.go.id/site/risiko-bencana-disaster-risk/>

Jannah, M. R. "7 Rumah Adat Tahan Gempa dari Sumatera Hingga Papua," Tempo.co, 8 November 2023. Diakses pada 15 Juli 2024, <https://tekno.tempo.co/read/1794241/7-rumah-adat-tahan-gempa-dari-sumatera-hingga-papua>

Lukyani, L. "Cara Kerja Tsunami Early Warning System," Kompas.com, 28 Agustus 2021. Diakses pada 18 Juli 2024, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/28/070200923/cara-kerja-tsunami-early-warning-system?page=all>

Patterson, J.H., McDougal, T. L. "Revenge of the Nerds: Disaster risk reduction and climate change," The New Humanitarian, 18 Maret 2021. Diakses pada 11 Juli 2024, <https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2021/3/18/revenge-of-the-nerds-disaster-risk-reduction-and-climate-change>

Memori Bencana

OLEH
MUHAMMAD
RIZKI

Perasaan tidak karuan dan campur aduk hadir di waktu yang sama pada Jumat sore, 28 September 2018 . . .

Hari itu gempa 7,4 SR menggerakkan bumi di Palu, Sigi, dan Donggala yang memicu Tsunami di Teluk Palu dan Likuifaksi di Kelurahan Balaroa, Petobo, dan Desa Rogo. Dari data BNPB terdapat 3.157 orang meninggal dan 532 hilang akibat bencana tersebut.

Ketidakhadiran fisik saya di Palu bersama keluarga dan teman-teman karena sedang magang di luar kota memberi rasa bersalah dan sedih yang mendalam. Satu-satunya cara yang bisa saya lakukan untuk “hadir” adalah dengan memastikan keluarga, teman, dan kenalan-kenalan aman dan selamat dari kejadian hari itu lewat telepon dan media sosial saat itu. Padamnya listrik dan rusaknya beberapa infrastruktur

internet pun membuat informasi yang saya dapatkan tidak begitu lengkap dan jelas. Perasaan cemas dan takut makin menumpuk, hanya berharap dan berdoa bisa mendapat kabar sesegera mungkin.

KABAR DAN PERTEMUAN

Keesokan harinya, saya mendapatkan kabar bahwa Tsunami menghantam teluk palu yang setelah dikonfirmasi terjadi dengan tiga gelombang dan ketinggian beragam dari 2-11 meter. Hal ini tidak pernah sekalipun saya bayangkan terjadi di Palu dan sekitarnya. Jembatan 4 Palu yang merupakan akses utama penghubung wilayah barat dan timur kota ini putus dan hancur, gedung Mall Tatura di tengah kota roboh, rumah-rumah di Balaroa dan





Petobo bergeser seperti genangan lumpur yang merembes yang adalah likuifaksi (American Geoscience Institute, 2017).. *Istilah apa lagi itu likuifaksi?* Dengan seluruh informasi ini, pikiran saya sibuk mencoba memproses semuanya, namun merasa hampa di waktu bersamaan Setelah informasi ini terproses, kepala saya hanya bisa tertuju pada satu pertanyaan: apa yang bisa saya lakukan dari jauh untuk membantu keluarga dan teman-teman saya?

Selang tak lama setelah memastikan keluarga dan teman-teman aman dan selamat, ada pesan masuk dari teman-teman komunitas saya di Forum Sudutpandang. Mereka mengabari kalau perlu bantuan untuk menyiarkan kabar dan berkomunikasi dengan rekan-rekan komunitas lain lewat media sosial instagram @forum-sudutpandang. Setiap kabar dan informasi yang relevan seperti lokasi evakuasi, wilayah rawan, posko, dan dapur umum kami siarkan melalui *instagram story* secara berkala. Tepat 1 Oktober

2018, kami sebagai Forum Sudut-pandang pun bersepakat membuka penggalangan dana donasi untuk korban bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sigi, dan Donggala. Gerakan kami didukung oleh Pamflet dan Indorelawan sebagai kolaborator awal mengkoordinasikan bantuan donasi, sebelum kemudian juga dibantu oleh Forum Lenteng dan Rock in Celebes di hari-hari selanjutnya.

Merespon cepat masa pemulihan di Palu, kami menyalurkan donasi kebutuhan pokok seperti sembako ke titik pengungsian yang belum dapat perhatian pemerintah. Informasi lokasi titik ini kami peroleh dari rekan atau keluarga yang dekat dengan kemah pengungsian tersebut. Selain memberikan bantuan, kami juga melakukan dokumentasi dan pengarsipan cerita dan pengalaman kebencanaan gempa, tsunami, dan likuifaksi. Hal ini didasari dengan keresehan kurangnya akan pengetahuan dan arsip terkait kejadian bencana di Kota Palu. Kami mengajak anak-

anak bermain, menggambar, dan menuliskan pengalaman mereka saat 28 September 2018. Cerita dan pengalaman tersebut kami arsipkan menjadi buku “Yang Kitorang Rasa Waktu Gempa” sebagai upaya meneruskan dan mewariskan pengalaman kebencanaan.

KEMBALI DAN BEREFLEKSI

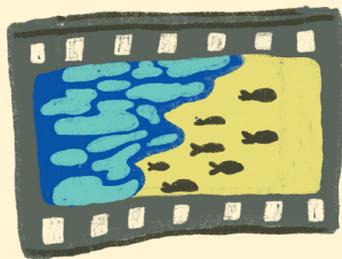
Hari kedelapan pasca gempa, tsunami, dan likuifaksi, saya akhirnya bisa kembali ke kota yang rasanya menyimpan banyak rahasia ini. Bandara menjadi pintu masuk saya sekaligus tempat pertama yang saya lihat, seakan menggambarkan situasi kota ini. Air mengalir dari beberapa bagian gedung, landasan pesawat yang retak di beberapa tempat, dan banyak tentara mondar-mandir menjaga bandara. Kalau tidak salah, sejak hari kedua setelah gempa, Bandara Mutiara Sis Aljufri - Palu menjadi salah satu tempat yang didatangi banyak orang untuk eksodus atau berpindah ke kota terdekat seperti Makassar, Manado, dan Balikpapan.

Menuju rumah, hampir sebagian jalanan aspal di kota ini memiliki retakan seperti garis urat. Di wilayah-wilayah tertentu yang langsung dilewati sesar atau patahan palu koro memiliki retakan yang lebih besar. Saya mendapati ibu, kakak, adik, ponakan, dan saudara lainnya duduk dan beristirahat di teras halaman rumah saya. Katanya, mereka tidak ingin lama-lama di dalam rumah karena takut ada gempa susulan. Beberapa hari sebelumnya mereka bahkan meninggalkan rumah dan mengungsi di titik terdekat dan hanya sesekali mengecek situasi dan kondisi rumah. Bahkan, setelah hari kedelapan dan hari-hari selanjutnya, gempa-gempa kecil terus menyusul dan memicu trauma orang-orang. Saya yang tidak ada di hari kejadian pun sampai merasa panik setiap kali ada gempa susulan. Bagaimana dengan keluarga dan teman-teman saya yang merasakan langsung?

Sulawesi yang dipenuhi dengan sumber mineral dan batuan seperti

besi, emas, nikel, dan lainnya yang hari ini diperebutkan oleh banyak pihak ternyata memiliki sisi lainnya. Nikmat sumber daya alam yang dimiliki ini ternyata cukup berbanding setara dengan kerentanan bencana. Sebagai bagian dari Indonesia dan wilayah Pacific Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik, potensi tsunami dan gempa yang diakibatkan oleh aktivitas dan pergerakan lempeng tektonik cenderung lebih banyak dan besar (National Geographic, 2023).

Meski Palu adalah kota yang tidak terlalu besar, dikelilingi gunung, dan berhadapan dengan laut dan teluk; tak pernah sekalipun saya berpikir bahwa tsunami besar pada September 2018 akan terjadi. Terlebih, saya kerap mendengar pernyataan orang-orang bahwa tsunami hanya terjadi di laut lepas tidak di teluk, sehingga saya yakin tidak ada tsunami yang akan datang. Hal ini tidak hanya diamini oleh saya, beberapa teman juga mendapatkan informasi serupa dari lingkungannya.



Padahal, jika merujuk pada temuan Ekspedisi Cincin Api 2011-2012, sudah pernah terjadi gempa besar yang berpusat di Teluk Palu terjadi pada tahun 1927 yang mengakibatkan gelombang pasang tsunami setinggi 15 meter di sekitar Teluk Palu seperti Talise, Mamboro, dan Tondo bagian timur dan utara Kota Palu (Kompas, 2018). Sayangnya, pengetahuan sejarah dan cerita kejadian ini tidak tersalurkan ke orang-orang Palu kebanyakan seperti saya dan teman-teman. Peristiwa 97 tahun yang lalu ini berbanding

terbalik dengan pernyataan sebelumnya soal teluk dan ketidakmungkinan terjadinya tsunami.

Setelah saya ingat lagi, ibu saya juga pernah bercerita juga soal banyak lumba-lumba dan ikan terdampar, serta dan beberapa rumah rusak akibat gelombang pasang sekitar tahun 1960an di sekitar Desa Sabang wilayah Pantai Barat Sulawesi Tengah. Tapi, karena jaraknya cukup jauh sekitar 150 Km dari Kota Palu, maka rasanya masih tidak mungkin terjadi tsunami. Apalagi

dengan misinformasi bahwa tsunami hanya terjadi di laut lepas. Pun, informasi-informasi seperti ini tidak pernah terkonfirmasi di ruang-ruang kelas belajar sekolah ataupun lainnya.

Enam tahun berlalu, saya kadang masih mempertanyakan apa yang ada di benak orang-orang tentang kejadian hari itu. Bagaimana duka, trauma dan ketakutan mereka akibat kejadian tersebut pelan-pelan pulih? Atau malah belum pulih? Bencana yang waktu itu hanya terlihat di televisi dan internet akhirnya terasa sangat dekat. Istilah 'hidup dengan bencana' menjadi pegangan saya untuk kehidupan di mana pun, terutama di Palu.

Saya banyak berharap di masa mendatang tidak ada lagi korban jiwa akibat ketidaktahuan kita dan kelalaian pemerintah. Jika terasa masih sulit membuat pengetahuan atau literasi bencana ini masuk ke dalam sistem pembelajaran, mendokumentasikan pengalaman dan membangun ruang diskusi berkelanjutan rasanya pelan-pelan bisa menjadi upaya alternatif. Setidaknya, warga akan tahu bahwa pernah terjadi tsunami, likuifaksi, dan gempa besar di Palu dan tidak menganggap ini sebatas mitos belaka. Siklus bencana yang jaraknya cukup panjang menjadi pekerjaan rumah bersama agar sesama kita perlu menjaga cerita dan pengetahuan ini terdokumentasi dan tersebar.

REFERENSI

American Geoscience Institute, s.v “glossary”. Diakses pada 15 Juli 2024, <https://www.americangeosciences.org/word/liquefaction-soil>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. “Tabular Bencana Indonesia, Gempa Bumi dan Tsunami Kota Palu 2018,” BNPB.go.id. Diakses pada 15 Juli 2024, <https://dibi.bnpb.go.id/xdibi2/read2/28419>

Brown, Tyson. “Encyclopedic Entry - Ring of Fire,” National Geographic, 19 Oktober 2023. Diakses pada 15 Juli 2024, <https://education.nationalgeographic.org/resource/ring-fire/>

Heriyanto, Devina. “[Updated] Central Sulawesi quake: What we know so far,” The Jakarta Post, 29 September 2018. Diakses pada 15 Juli 2024, <https://www.thejakarta-post.com/news/2018/09/29/central-sulawesi-quake-what-we-know-so-far.html>

Wendyartaka, Anung. “Warga Palu, Merasa Aman di Daerah Rawan,” Jelajah Kompas, 2 Oktober 2018. Diakses pada 15 Juli 2024, <https://jelajah.kompas.id/ekspedisi-cincin-api/baca/warga-palu-merasa-aman-di-daerah-rawan/>

Grobongan Rumahku, Aku Sayang Tapi Pilu

OLEH RIFKA DYAH SAFITRI

Di suatu pagi yang terik, terdengar suara lagu mengalun teduh.

*“Aku pernah berjalan di atas bukit
Tak ada air
Tak ada rumput
Tanah terlalu kering untuk ditapaki
Panas selalu menghantam kaki dan kepalaku”*



Pernah tahu lirik ini? Dibandingkan dengan lagu-lagunya yang lain, lagu dari Payung Teduh ini sepertinya kurang populer. Walau Interpretasi setiap orang tentang makna dari lagu ini pun pasti berbeda-beda, bagiku, lirik ini menggambarkan pengalamanku yang akan kuceritakan disini.

Tapi, eitts... kenalan dulu~ Namaku Rifka. Sebenarnya, panggilanku bukan hanya sekedar "Rifka". Aku memiliki panggilan lainnya. Bayangkan 2 jari yang dibentuk seperti lambang peace☺, lalu ditempel ke pipi. Nah, itu panggilan isyaratku.

Kok aku punya panggilan isyarat? Ya, tentu saja aku punya pang-

gilan isyarat, karena aku Tuli. Lah, kamu Tuli? Kok kamu tahu lagu? Memangnya tidak boleh, ya? Aku punya cara sendiri untuk mendengarkan lagu. Karena hobiku mendengarkan lagu, makanya aku tahu lagunya Payung Teduh. Lagu mereka bukan cuma "Akad" doang, kan?

Skip... Skip... Lanjutt~

Sebenarnya, apa sih yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata "Bencana"? Mungkin banjir? Tanah longsor? Gunung meletus? Tsunami? Bagiku, yang terlintas di pikiran saat mengetahui kata bencana adalah dua hal, yakni kekeringan dan banjir rob. Aku akan cerita sedikit mundur menyoal ini, ya.



Sebagai anak pertama perempuan dan Tuli dari keluarga dengar, aku tumbuh besar menjadi anak desa. Ya, aku tinggal di Kabupaten Grobogan. Buat yang belum tahu Grobogan, Grobogan itu ada di Jawa tengah sekitar 3-4 jam atau hampir 2 jam kalau naik kereta dari Semarang. Jangan dibayangkan durasi 3-4 jam atau 2 jam ini seperti di Jakarta, ya. Perjalanan ini lebih jauh karena aku benar-benar tinggal di daerah pedesaan. Supeeeerrr jauh dari kota. Maklum, kedua orangtuaku berprofesi sebagai seorang petani. Profesi kedua orang tuaku sebagai petanilah yang kemudian menjadi titik awal bagaimana aku bisa sadar dan lebih paham tentang isu lingkungan. Apalagi, aku seorang Tuli.

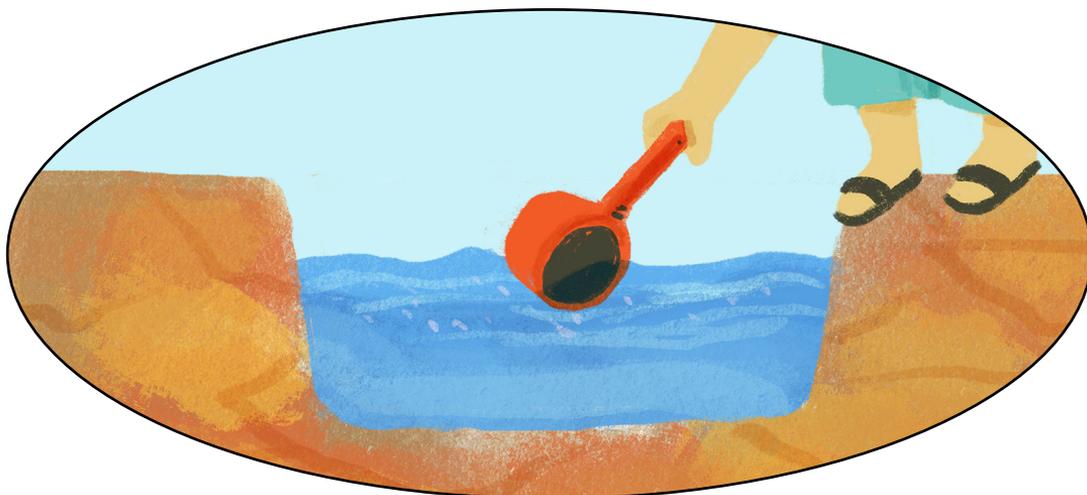
Sejak sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), aku sudah

dituntut untuk mencari air bersih di desa sebelah yang berjarak 1.5 km dari rumahku. Aku biasanya mengendarai sepeda roda dua sendirian atau bersama ibuku dengan melewati jalan yang penuh bebatuan dan tajam, dikelilingi sawah yang sedang kering cocok ditanami jagung. Walau daerah Grobogan terkenal dengan daerah lumpur bergaram dan jalan rusak, terdapat beberapa sumber mata air dan hamparan sawah. Kondisi ini membuatku selalu bertanya-tanya, kenapa daerahku sering mengalami “kekeringan”?

Menurut World Meteorological Organization (WMO), kekeringan adalah periode cuaca kering yang tidak normal yang ditandai dengan kurangnya curah hujan di bawah ambang batas



Gambar 1: Gambar tanah kering di Grobogan dekat rumahku (Dok : Pribadi)



tertentu pada area yang luas dan periode yang lebih lama dari satu bulan.

Untuk memahami kekeringan di wilayahku, mari kita semakin mundur ke pengalamanku 15 tahun yang lalu. Saat itu aku kira-kira masih berusia 9 tahun dan masih kelas 4 SD. Sudah hampir setahun (2009 - 2010) lamanya bencana kekeringan melanda di daerahku. Wilayah kabupaten Grobogan memiliki sekitar kurang lebih 1 juta penduduk. Bayangkan deh, kita lihat 1% (satu persen) saja, artinya ada kurang lebih 10.000 jumlah penduduk tersebut tidak memiliki air bersih dan harus menggali di sungai yang kering untuk mendapatkan air keruh. Aktivitas yang harus kami lakukan karena kekeringan ini sering disebut “ngepek banyu” alias mengambil air dimanapun termasuk di sumur, ladang, sungai yang kering, waduk, menggali tanah, dan bahkan membeli air.

Saiful Anwar (2024) melalui laman Muria News menyampaikan bahwa data yang diperoleh dari Badan Pusat

Statistik (BPS) menggambarkan bahwa Grobogan terkenal dengan daerah yang angka kemiskinannya naik dari tahun per tahun. Hal ini berkaitan erat dengan bencana kekeringan serta biaya air yang kian mencekik dan membunuh ekonomi masyarakat.

Aku kasih contohnya, nih. Bayangkan, bagaimana rasanya jika kamu adalah seorang warga yang memiliki sumur, namun terpaksa harus membeli air bersih dengan mobil tangki? Untuk membeli air bersih tersebut, setiap keluarga harus merogoh kocek sebesar 150 ribu rupiah hanya untuk membeli sebanyak 4.000 liter untuk satu sumur. Itupun hanya bisa bertahan hanya 1-2 minggu, tergantung satu rumah berjumlah berapa anggota keluarga. Artinya, untuk kebutuhan selama satu bulan, setiap keluarga harus merogoh kocek hampir jutaan rupiah untuk membeli air bersih.

Kekeringan ini juga begitu berdampak bagi kehidupan sehari-hari keluargaku



Gambar 2 : Kegiatan “Ngepek Banyu” – mengambil air sumber yang kering (Dok : Solopos.com)

dan para tetangga. Agar tetap bisa mengakses air bersih, kami sering berbagi tugas; perempuan mengerjakan kerja-kerja domestik – termasuk “ngepek banyu” dan laki-laki bekerja memenuhi kebutuhan mandi, cuci baju, cuci piring, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Jika hujan sekali saja, keluargaku bersama penduduk di daerah kami akan menyiapkan 2 ember sebesar 12 liter, 3 baskom, dan 1 padasan-gentong besar dari tanah liat. Seringkali, kami berharap hujan datang dan mengguyur daerah kami sekali lagi, supaya kami bisa merasa tenang dan tidak mengkhawatirkan masalah air lagi. Bayangkan, kami bukan hanya memikirkan cara mengisi perut saja. Kami harus memikirkan juga berapa kubik air yang bisa kami pakai esok hari.

Ya, begitulah, Rifka yang saat itu masih kecil harus merasakan “ngepek banyu”.

Kalau melihat kondisi sekarang, walau 15 tahun telah berlalu, tidak ada perubahan yang positif dan signifikan untuk daerah sekitar rumahku. Menurut data yang menggunakan satu desa di Grobogan sebagai sampel, hanya 38% warga kabupaten Grobogan yang dikategorikan siap dalam menghadapi bencana (Pranata, Aji, 2021). Jika ditotal dengan desa-desa lainnya sebagai sampel penelitian, angka terkini bisa jadi lebih besar. Ditambah lagi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di bulan Februari 2024 bahkan mencatat bahwa bencana banjir yang melanda Kabupaten Grobogan berdampak ke 133 desa.

Saat aku sudah mulai berkuliah dan dalam program magang, aku memutuskan untuk menjadi bagian program Adaptasi Perubahan Iklim Inklusif di salah satu NGO (Non-Government

Organisation) yang berada di Jawa Tengah. Dengan pengalamanku di dunia Disabilitas yang penuh tantangan, aku diberikan tanggung jawab di bagian spesialis inklusif saat bekerja di organisasi tersebut. Aku kemudian banyak menemukan sejumlah masalah yang berlapis-lapis seperti bagaimana Tuli belum tahu apa itu bencana dan apa saja jenis bencana, Tuli tidak mendapatkan akses informasi peringatan dini saat terjadi banjir di desanya, Tuli menganggap bencana adalah hal yang sepele karena sudah terbiasa, hingga Tuli tidak dianggap menjadi penyintas evakuasi pertama karena merupakan disabilitas tidak terlihat. Dalam program ini aku menerapkan mandat inklusif diantaranya Data Terpilah, Aksesibilitas, Akomodasi yang Layak, Partisipasi, Peningkatan Kapasitas, dan Prioritas Perlindungan untuk semua disabilitas dan non-disabilitas yang terlibat.

Selama menjalani program, aku sangat berharap dan selalu merefleksikan diri sendiri, semoga tidak hanya aku yang sendirian menyadari bahwa bencana sangat berdampak ke diri kita, tetapi semua ragam Disabilitas bisa menyadari ini. Jika melihat dari perspektif desa, semoga masyarakat dan pemerintah desa semakin berani dan terbuka untuk melibatkan Disabilitas dalam perencanaan hingga tim siaga bencana. Orang dengan Disabilitas adalah manusia, namun bukan manusia yang harus dikasihani. Orang dengan ragam Disabilitas adalah manusia yang perlu kita libatkan dalam semua hal karena memiliki perspektif yang berbeda.

"Nothing About Us Without Us", tidak ada kebijakan yang harus diputuskan perwakilan manapun tanpa partisipasi penuh dari anggota kelompok yang terdampak kebijakan itu.

REFERENSI

Anwar, S. "Ini Angka Kemiskinan di Grobogan dari Tahun ke Tahun." berita.murianews.com. 19 April 2024. Diakses 10 Juli 2024, <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/412629/ini-angka-kemiskinan-di-grobogan-dari-tahun-ke-tahun>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2009 - 2011. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin. jateng.bps.go.id. Diakses 10 Juli 2024, <https://jateng.bps.go.id/indicator/12/87/4/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>

CBM Global Disability Inclusion, n.d. Disability inclusive Disaster risk Management: Voices from the field & good practices. Diakses 21 Juli 2024, https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/Disability_Inclusive_Disaster_Risk_Management.pdf

United Nations, 2003. Observance at the United Nations Headquarters, New York. "Nothing about Us, Without Us" International Day of Disabled Persons, 2004. Diakses 14 Agustus 2024, <https://www.un.org/esa/socdev/enable/iddp2004.htm#:~:text=The%20motto%20%E2%80%9CNothing%20About%20Us,and%20with%20persons%20with%20disabilities>.

WMO, 2020. Guidelines on the Definition and Monitoring of Extreme Weather and Climate Events. World Meteorological Organization (WMO). Diakses pada 21 Juli 2024, http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/documents/GUIDELINESONTHEDEFINITIONANDMONITORINGOFEXTREMEWEATHERANDCLIMATEEVENTS_09032018.pdf

MERAPI MARAH

KOMIK STRIP oleh
N. Aidawardhani



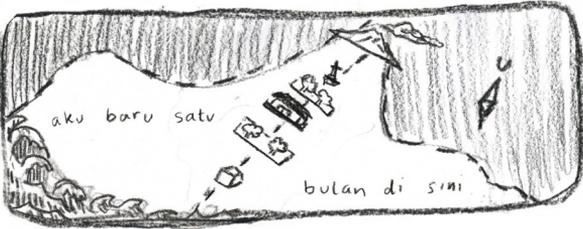
dulu aku pernah lihat sejenis
domba berbulu lebat sekali

ia ditakuti
santero kota!
katanya
"iki pertondo,
Mbah Petruk
nesu"



Marah ?

Entahlah, setidaknya karena
domba itu sekolahku
libur satu minggu!



aku baru satu
bulan di sini

menjauh dari utara, aku pulang ke selatan
begitu cara orang Jogja menavigasikan
perjalanan mereka, kami menjauhi
lor (utara), lokasi Gunung Merapi



katanya, rumahku
tempat yang berisiko

Baru empat tahun lalu terjadi gempa bumi di selatan,
sekarang giliran wilayah utara meletus!

Sudah seminggu libur, hujan abu masih turun. Tidak ada yang betul betul paham kami harus apa. Kata keluargaku, "Pasrah saja," sambil menonton berita terkini di TV tabung kami.



TV isinya duka meninggalnya Mbah Maridjan yang menolak mengungsi

aku ikut berduka sekaligus kagum

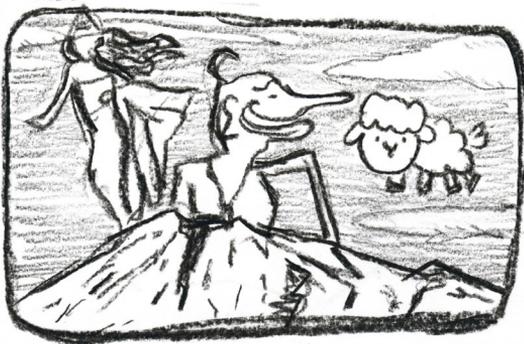
"Heroik sekali"



Tapi... apa dengan bertahan pasrah di tengah bencana ini membuatku juga heroik?



Lagipula apalagi yang bisa aku lakukan selain menunggu sekolah masuk lagi. Bermain di luar dengan teman sebaya pun belum bisa



Siapa pun itu, apa pun bentuknya, sekarang dia sedang marah.

Sebenarnya orang-orang tahu gak ya, kita gak boleh dekat-dekat sama Merapi yang lagi marah?

Kenapa orang-orang dewasa seperti pasrah dan juga kebingungan?



ARGHI
aku MARAH



MARAH SEPERTI
MERAPI

N. Aidawar dhan



Bilik *Cinta* di Pengungsian

OLEH UMAR NASHIH ULWAN

Bencana alam sering kali memakan korban jiwa dan bahkan memaksa ribuan orang untuk meninggalkan rumah dan mengungsi ke lokasi-lokasi penampungan. Dalam situasi darurat kebencanaan, perhatian umumnya tertuju pada penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat kebutuhan-kebutuhan lainnya perlu diperhatikan. Aktivitas seksual pasangan suami istri merupakan salah satunya. Kebutuhan untuk melakukan aktivitas seksual pasangan suami istri biasanya difasilitasi melalui pengadaan 'bilik cinta'. Meskipun topik ini mungkin terdengar tabu dalam konteks bencana, penyediaan fasilitas ini dapat berkontribusi pada pengurangan risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual, serta menjaga kesejahteraan mental dan fisik pengungsi.

PENTINGNYA RUANG BERCINTA UNTUK PENGUNGI

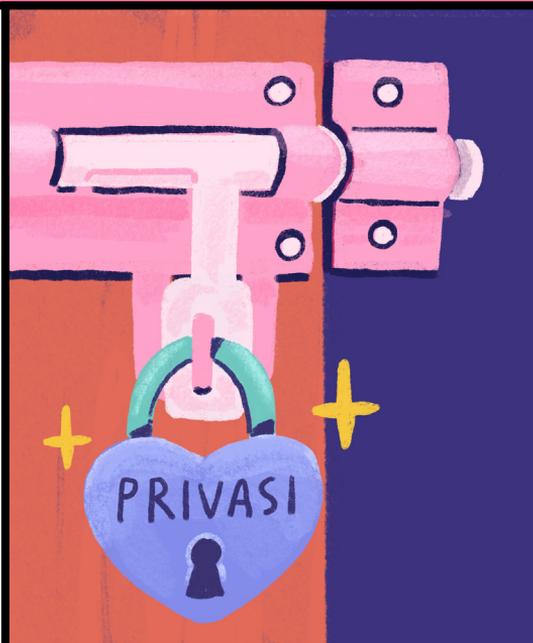
Kebutuhan saat bencana, termasuk aspek seksual dari kehidupan pasangan suami istri, sering kali terabaikan khususnya dalam situasi bencana. Misalnya, selama erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Indonesia, pengungsi yang hidup dalam kondisi sesak di

tempat penampungan mengajukan permintaan untuk bilik cinta. Kombes Pol Darman Sinuraya, Koordinator Pengamanan dan Penyelamatan Pengungsi Sinabung, mengungkapkan bahwa permintaan ini didorong oleh kebutuhan pasangan suami istri untuk memiliki tempat khusus untuk beraktivitas secara intim. Hal serupa dijumpai pada erupsi Gunung Merapi di tahun 2010, di mana pengungsi juga meminta bilik cinta sebagai bagian dari kebutuhan mereka. Kasus ini menunjukkan bahwa permintaan untuk fasilitas semacam ini bukanlah hal baru dan sering kali muncul dalam situasi darurat.

Ketika pasangan tidak memiliki tempat yang layak untuk berhubungan seksual, mereka dapat mencari solusi yang berisiko, seperti kembali ke rumah mereka yang sudah hancur dan mencari ruang bercinta yang tidak aman. Pengadaan bilik cinta lantas dianggap sebagai langkah penting untuk mengatasi tantangan tersebut. Di sisi lain, kekurangan fasilitas untuk kebutuhan ruang bercinta di tempat pengungsian dapat mempengaruhi tingkat kekerasan seksual. Menurut laporan UNFPA (2019), sebanyak 14% responden survei perempuan dewasa yang merupakan korban bencana Palu-Sigi Donggala mengaku mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT). Peristiwa tersebut dilandaskan oleh banyak hal, contohnya suami yang menganggap istri tidak setia, mencurigai istri sering pergi dan tidak patuh, dan menolak untuk melakukan hubungan seksual. Salah satu contohnya adalah korban KDRT di hunian sementara oleh suaminya karena permasalahan sepele, yaitu pelaku tidak berkenan tidur dengan keadaan lampu menyala ketika maksud istri adalah menghormati kakaknya yang berkunjung (Kompas, 2019).

Kurangnya privasi dapat memicu ketegangan yang dapat berujung pada konflik dan, dalam kasus ekstrem, kekerasan. Selain itu, tanpa adanya ruang yang aman, pengungsi mungkin terpaksa mencari tempat tersembunyi yang berpotensi tidak aman. Penyediaan bilik cinta dapat membantu mengurangi risiko ini dengan memberikan tempat yang aman dan sesuai bagi pasangan untuk menyalurkan kebutuhan biologis mereka. Dr. Boyke Dian Nugraha pernah menjelaskan bahwa hubungan seksual adalah kebutuhan dasar pasangan suami istri yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan kesehatan reproduksi, bahkan dalam situasi darurat seperti bencana (Char-



melita, 2022). Dalam konteks tanggap darurat, seperti bencana alam, dukungan keluarga dan kehangatan menjadi aspek penting bagi kesehatan mental pengungsi.

Setelah bencana seperti gempa bumi terjadi, proses pemulihan infrastruktur, pemukiman, dan fasilitas publik memerlukan waktu yang lama. Sementara itu, dampak gempa susulan yang terus terjadi dapat memperburuk kondisi. Dalam hal ini, bilik cinta sebagai fasilitas untuk pasangan suami istri di kawasan pengungsian muncul sebagai bentuk dukungan kemanusiaan. Fasilitas ini bertujuan untuk memenuhi hak pasangan tanpa harus mening-

galkan kawasan pengungsian atau mengganggu pengungsi lainnya.

Kasubdit Pencegahan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), Drs. Helmi DT.R.Mulya, M.Si, dalam kegiatan “Pemanjapan Petugas Pelopor Perdanaian Provinsi Kaltim Tahun 2019,” menegaskan bahwa pendirian bilik cinta di lokasi pengungsian penting untuk mencegah pertengkaran rumah tangga akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan seksual. Ini penting untuk menjaga keharmonisan dan mencegah potensi konflik sosial di masyarakat pengungsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menggarisbawahi bahwa hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak dasar setiap individu. Oleh karena itu, penyediaan bilik cinta di kondisi darurat dianggap sebagai hal yang wajar untuk membantu pasangan suami istri dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa harus meninggalkan kawasan aman.

Pada akhirnya, keberadaan bilik cinta ini memberikan pilihan bagi pasangan suami istri untuk menggunakan fasilitas tersebut sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Hal ini memastikan bahwa hak dan kebutuhan individu tetap diperhatikan dalam situasi darurat.

KOORDINASI DAN PENYEDIAAN FASILITAS

Untuk memastikan penyediaan fasilitas bilik cinta yang sesuai dan efektif di lokasi pengungsian, penting untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak. Penanggung jawab kekerasan berbasis gender perlu, pertama, berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan pengungsi setempat untuk mendiskusikan fasilitas apa yang sesuai kebutuhan mereka termasuk pengaturannya. Kedua, berkoordinasi dengan koordinator sub kluster kesehatan



reproduksi, untuk mendiskusikan tentang penyediaan fasilitas tersebut dengan koordinator klaster kesehatan dan klaster perlindungan dan pengungsian. Selain itu, pengelola fasilitas harus mempertimbangkan privasi dan keamanan, seperti menyediakan ruang dengan penerangan yang memadai, tanda laki-laki atau perempuan, dan kunci pada pintu kamar mandi.

Penanggung jawab kekerasan berbasis gender juga harus terlibat dalam perencanaan ini untuk memastikan bahwa fasilitas yang disediakan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjaga keamanan dan kesejahteraan semua pengungsi.

KESIMPULAN

Meskipun bilik cinta tampaknya merupakan fasilitas yang tabu dalam konteks bencana, penyediaan ruang ini merupakan bagian penting dalam menjaga kesejahteraan pengungsi. Kebutuhan seksual harus diakui sebagai bagian integral dari perencanaan bantuan bencana untuk menghindari dampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik pengungsi. Dengan mempertimbangkan semua aspek

kebutuhan pengungsi, termasuk kebutuhan untuk privasi dan ruang intim, kita dapat memberikan bantuan yang lebih holistik dan efektif dalam situasi krisis.

REFERENSI

“Pedoman pelaksanaan paket pelayanan awal Minimum (PPAM) kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan,” 2017, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Diakses 11 Juli 2024, <https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/FINAL%20Pedoman%20PPAM%20-%20Bahasa.pdf>

“Pengungsi Sinabung dibuatkan Bilik Cinta,” Merdeka.com, 21 Januari 2014. Diakses 11 Juli 2024, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pengungsi-sinabung-minta-dibuatkan-bilik-cinta-di-pengungsian.html>

Susanto, Eko. “Mengintip Bilik Asmara Untuk Pengungsi Gunung Merapi di Magelang,” Detik, 17 November 2022. Diakses 11 Juli 2024, <https://news.detik.com/berita-jawa-tenengah/d-5258252/mengintip-bilik-asmara-untuk-pengungsi-gunung-merapi-di-magelang>

Charmelita, Dinda. “Menyoal Urgensi Bilik Asmara di Pengungsian Bencana Alam,” Kumparan, 23 Desember 2022. Diakses 11 Juli 2024, <https://kumparan.com/dinda-maharani-1650614315384784409/menyoal-urgensi-bilik-asmara-di-pengungsian-bencana-alam-1zUrBhvy6gj/full>

Amellya, Lia. “Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual saat Bencana,” Cari Layanan, 18 Mei 2022. Diakses 11 Juli 2024, <https://carilayanan.com/kekerasan-berbasis-gender-dan-seksual-saat-bencana/>

KIAMATNYA PEMUKIMAN PADAT

OLEH ANNISA INAYAH

Hai, perkenalkan, aku Nay. Aku adalah seorang perempuan usia 28 tahun yang sedang memulai hidup mandiri. Proses ini kumulai dari tahun 2022, ketika aku memutuskan untuk tinggal sendiri setelah sebelumnya selalu tinggal bersama orangtua. Selain karena ingin mandiri, keputusan ini juga didukung oleh jarak antara rumah dengan kantor tempatku bekerja yang tergolong cukup jauh. Aku kapok menghabiskan banyak waktu di jalan terlebih Jakarta yang memang terkenal sebagai kota 1000 kemacetan.

Waktu itu aku memutuskan mencari kos-kosan melalui aplikasi. Aku kesulitan menemukan *kos-kosan* di kawasan Jakarta Selatan dengan harga di bawah Rp.2.000.000 yang memiliki fasilitas kamar dan lingkungan yang nyaman. Terlebih, aku juga mementingkan lingkungan yang cukup berjarak antara satu rumah dengan lainnya dan memiliki jendela serta ventilasi memadai, agar siklus udaranya berjalan lancar.

Setelah dua minggu pencarian dan survei lokasi, tidak ada yang cocok. Aku merasa kehabisan waktu. Aku lantas nekat memesan *kos-kosan* yang kelihatannya nyaman melalui aplikasi tanpa melakukan survei. Aku bahkan memberanikan diri memesan kamar tersebut untuk tiga bulan, alias untuk Juli-September.

Saat tiba waktunya *check-in*, aku diantar oleh orangtuaku. Ketika sampai di lokasi, kos tersebut tidak mudah ditemukan. Aku tidak paham persis lokasi kos yang sudah kupesan ini, sampai akhirnya penjaga kos mengirim pesan untuk turun 300 meter di sekitar lokasi awal kos yang kutahu. Selebihnya, aku harus jalan kaki menyeret koper memasuki sebuah gang. Gang kecil yang hanya muat untuk satu motor saja.

Tibalah aku di bangunan kos empat lantai yang menempel pada bangunan rumah kanan dan kiri, lengkap dengan pagar yang tinggi dan tertutup. Ketika masuk ke dalam, kupikir kos ini terlihat nyaman dan cukup luas. Sayangnya, di waktu bersamaan aku juga langsung merasakan sirkulasi udara yang tidak terasa, ventilasi yang hampir tidak ada, dan cahaya yang hanya bisa masuk sedikit dari sela-sela pagar tinggi kos ini.

Aku dapat kamar nomor 1, berlokasi di lantai bawah dengan jendela kamar menghadap ke kamar nomor 2 dan dapur bersama. Saat masuk ke dalam kamar, aku sangat kaget karena ukurannya yang hanya pas untuk satu kasur. Satu kasur, dengan TV kabel yang berjarak hanya sekian *cm*, dan kamar mandi di sebelahnya. Aku menghela nafas dan memastikan pada diriku sendiri bahwa apa yang aku hadapi kini tidak sesuai dengan ekspektasi.

Satu minggu berjalan, aku bisa menikmati. Aku cukup senang karena apabila pulang dari kantor pada malam hari, warga di sekitar kos masih beraktivitas sehingga aku merasa aman. Terlebih, kos ini ternyata memiliki *rooftop* di lantai 4. Aku sering mencari udara segar dan cahaya matahari di sana.

Kenyamanan ini ternyata bersifat sementara. Memasuki minggu kedua, aku mulai sering mendengar musik dangdut disertai suara laki-laki paruh baya bernyanyi di dini hari. Musiknya begitu kencang hingga dinding kamarku bergetar mengikuti alunan bass musik tersebut. Musik tersebut bersumber dari rumah sebelah kosku yang dindingnya memang menempel dengan kos. Terkadang aku kesal, namun

2012





selebihnya aku menerima dan memilih berdamai dengan irama tersebut.

Memasuki bulan Agustus hingga September, tiba-tiba aku dihantui rasa khawatir berlebih. Hal penting yang menjadi alasan kuat rasa khawatir ini adalah tingginya angka kebakaran di Jakarta pada bulan-bulan tersebut yang juga adalah bulan-bulan dengan musim kemarau berkepanjangan. Aku juga sedang lebih sering menghabiskan waktu di kosan, sehingga lebih sering memperhatikan perilaku warga sekitar, siklus udara pada bangunan dan pemukimannya, serta area yang bisa ku lihat dari atas *rooftop*.

Ada satu berita di bulan Agustus yang menjadi awal mula rasa khawatir itu muncul, yaitu kebakaran sebuah kos di Tambora, Jakarta Barat. Enam penghuni kos tersebut tewas begitu saja. Mereka berusaha untuk keluar dari kosnya, namun kondisi rumah kos ditutup terali besi. *Kiamat di pemukiman padat*, pikirku.

Aku ingat betul bahwa sepanjang minggu di awal September, aku mendengar dua hingga tiga kasus kebakaran di pemukiman padat Jakarta seperti kebakaran di Setiabudi, Jakarta Selatan pada tanggal 4 September, lalu di Salemba, Jakarta Pusat 2 hari setelahnya (6 September), di Tanjung Priok, Jakarta Utara keesokan harinya lagi (7 September), dan ditutup dengan kebakaran di Tambora, Jakarta Barat pada tanggal 13 September. Kebakaran-kebakaran yang terjadi disebabkan oleh banyak hal. Namun, yang paling parah adalah karena korsleting listrik.

Setelah mendapat kabar berurutan tersebut, aku semakin memperhatikan struktur bangunan, kelistrikan, dan peta area pemukiman padat ini. Ada beberapa hal yang kemudian berhasil aku petakan. Pertama, satu-satunya akses masuk dan keluar adalah pagar depan— dengan kunci pagar yang digembok dua lapis dan cukup sulit untuk dibuka. Kedua, tidak ada alat deteksi asap di dalam kos

maupun tabung pemadam api. Ketiga, selama hampir dua bulan tinggal di sini, aku tidak pernah bertemu penghuni kos lain. Kos ini selalu terlihat sepi, sehingga jika terjadi apa-apa, aku tidak akan benar-benar tahu apakah penghuni kos lainnya berada di dalam kamar saja atau memang tidak sedang berada di kos.

Selain itu, pada jam-jam tertentu misalnya pukul 11.00-13.00 WIB, lingkungan sekitar kosku pasti sangat sepi dan hampir tidak ada yang keluar rumah. Aku juga memprediksi apabila terjadi kebakaran karena hal apapun, mobil pemadam kebakaran akan sangat sulit memasuki area kos ini. Bahkan, mobil pemadam kebakaran mungkin hanya bisa masuk sampai jarak kurang lebih 700 meter dari kos.

Pada bulan-bulan tersebut, setiap ingin tidur, aku selalu berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana sulitnya menyelamatkan nyawa dan barang berharga di antara jarak dan kepadatan rumah satu sama lain. Aku juga sering melamun dan berpikir sejenak bahwa sepertinya ini bukan hanya tanggung jawab warga setempat.

Mitigasi pemerintah dalam menangani kebakaran hampir nihil. Satu-satunya upaya yang pernah aku dengar adalah

adanya sosialisasi apabila terjadi kebakaran di rumah atau sekadar cara melepaskan tabung gas. Aku tidak paham apakah pemerintah Jakarta memiliki pemetaan dan kebijakan terkait pemukiman warga atau tidak. Aku rasa tata kelola lahan—sebagai aspek penting yang berpengaruh pada mitigasi kebakaran ataupun bencana lainnya—di Jakarta juga hampir mustahil untuk diperbaiki.

Bagiku, tingginya minat pembangunan hunian di Jakarta dan pemanfaatan lahan terlihat berbanding terbalik dengan keamanan yang disiapkan pemerintahan. Misalnya saja, instalasi kelistrikan yang amburadul dan semrawut sering kali aku temui di pemukiman padat. Belum lagi, kita sering menemukan kabel listrik yang sudah usang dan hampir rusak—atau bahkan sudah rusak dan/atau putus, namun masih terpasang. Artinya, pengelolaan kabel listrik pun tidak sesuai dengan standar keamanan. Aku juga sering menemukan tingginya angka pencurian kabel yang berbanding terbalik dengan penertibannya.

Walau pemerintah selalu menghimbau untuk rutin mengecek kondisi kelistrikan di rumah dan alat elektronik, apakah himbauan dan sosialisasi sudah cukup untuk mengatasi masalah

kebakaran di DKI Jakarta yang kian meningkat? Sepanjang tahun 2024 yang belum kelar ini saja, kebakaran masih mendominasi bencana di Jakarta dan tercatat bahwa sudah ada 242 kasus kebakaran sepanjang Januari hingga Mei 2024 (BPBP, 2024).

Sampai hari ini, walau aku sudah tidak tinggal di kos yang kuceritakan di sini, pengalaman hidup bersama rasa khawatir dan takut tidak pernah kulupakan. Jika melihat kembali masalah ini, rasanya ada ketidakadilan yang lebih mendasar. Aku yakin pemerintah—atau warga kaya raya lainnya—yang tinggal di pemukiman elit seperti Pondok Indah atau Menteng tidak akan pernah merasakan ketakutan-ketakutan akan bahayanya tinggal di pemukiman padat. Sekian ceritaku.

REFERENSI

Huda, Larissa. "Baru 2 Pekan, 14 Kebakaran Terjadi di Jabodetabek Selama September 2022". *Megapolitan.kompas.com*. 16 September 2022. Diakses 15 Juli 2024, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/16/13302091/baru-2-pekan-14-kebakaran-terjadi-di-jabodetabek-selama-september-2022>

Huda, Larissa. "Kasus Kebakaran Ibu Kota Sedang Tinggi, Pemprov DKI Gencarkan Sosialisasi Pencegahan". *Megapolitan.kompas.com*. 27 September 2022. Diakses 15 Juli 2024, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/27/05000001/kasus-kebakaran-ibu-kota-sedang-tinggi-pemprov-dki-gencarkan-sosialisasi>

Katingka, Nasrun. "Kebakaran Jakarta, Petaka Angin Kemarau dan Masalah Klasik Pemukiman Kota". *Kompas.id*. 24 Agustus 2023. Diakses 15 Juli 2024, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/08/24/kebakaran-jakarta-petaka-angin-kemarau-dan-masalah-klasik-permukiman-ibu-kota>

Rostanti, Qommarria. "Kebakaran Dominasi Bencana di DKI Jakarta Hingga Mei 2024". *Republika.id*. 28 Mei 2024. Diakses 15 Juli 2024, <https://news.republika.co.id/berita/se7fc0425/kebakaran-dominasi-bencana-di-dki-jakarta-hingga-mei-2024>

Sujatmiko, Edy. "Kebakaran di Indekos Tambora Dipicu Dari Korsleting Kipas Angin". *Antaraneews.com*. 18 Agustus 2022. Diakses 15 Juli 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/3065429/kebakaran-indekos-di-tambora-dipicu-dari-korsleting-kipas-angin>

Prastiwi, Devira. "Polisi Berhasil Ungkap Kasus Dugaan Pencurian Kabel di Tambora, Jakbar". *Liputan6.com*. 28 Juni 2024. Diakses 15 Juli 2024, <https://www.liputan6.com/news/read/5630627/polisi-berhasil-ungkap-kasus-dugaan-pencurian-kabel-pln-di-tambora-jakbar>



ASAP
HITAM YANG
MENGEPUNG
LINGKUNGANKU

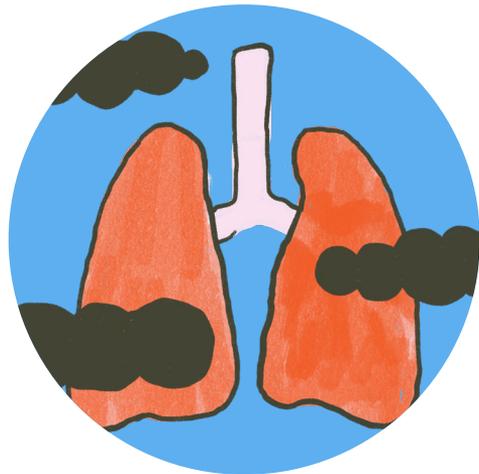
OLEH ELLIAH AYU

Di antara banyaknya budaya dan tradisi yang tersebar di seluruh Indonesia, terdapat sebagian yang bisa jadi perlu dipikirkan kembali praktiknya. Salah satunya adalah nabun, alias pembakaran sampah, yang hingga saat ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Nabun merupakan istilah yang biasa diucapkan oleh orang yang berasal dari suku Betawi yang artinya membakar. Nabun yang biasanya dilakukan pada sore hari ini kerap dianggap sebagai tradisi turun temurun yang mempermudah pekerjaan rumah tangga karena dapat memusnahkan sampah rumah tangga. Namun, harga apa yang sebenarnya harus dibayar di balik kepraktisan nabun?

Walau terdengar sederhana dan tidak berbahaya, kebiasaan menabun ini sempat membuat gempar

lingkungan di sekitar rumahku pada beberapa tahun lalu. Kala itu, satu perkampung kami terkepung oleh asap hitam yang dihasilkan dari pembakaran sampah di salah satu TPS (tempat pembuangan sampah). TPS ini dikelola oleh warga setempat secara ilegal, dengan posisi sangat dekat dengan pemukiman warga. Berdasarkan informasi yang aku terima pembakaran itu terjadi akibat ulah salah satu warga yang melakukan kegiatan nabun di dekat TPS tersebut. Lalu akibat kelalaiannya, api menjalar sampai ke TPS yang akhirnya menimbulkan kebakaran di dalam TPS tersebut.

Entah siapa yang harus disalahkan pada saat itu. Akupun hanya berharap asap itu hilang segera dan juga bau tidak sedap yang datang bersama penyebaran asap itu. Warga kemudian hanya bisa



melaporkan keluhan ini kepada RT setempat dan ditindaklanjuti dengan memanggil pemadam kebakaran. Namun, proses pemadaman tidak semudah yang dibayangkan. Pemadam kebakaran tidak bisa membantu dikarenakan sumber kebakaran berasal dari gunung sampah yang berbahaya jika didekati. Setelah RT setempat melakukan mediasi antara warga terdampak dan pemilik TPS, pihak TPS akhirnya harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami warga. Adapun TPS kemudian harus ditutup agar hal serupa tidak terjadi kembali.

Tak hanya beresiko menimbulkan kebakaran, seperti yang dialami, nabun sebenarnya begitu berbahaya bagi kesehatan siapapun karena polusi yang ditimbulkan. Faktanya, nabun merupakan kegiatan yang bisa menghasilkan polutan beracun seperti karbon monoksida, formaldehida, arsenic, furan, dan VOC juga emisi beracun. Semua polutan yang berbahaya jika terhirup oleh manusia ini muncul khususnya karena sampah rumah tangga biasanya menggabungkan sampah organik dan anorganik. Banyak studi mengatakan bahwa polusi dari sampah bisa menye-

babkan penyakit kronis seperti bronchitis, emphysema, kanker, kerusakan ginjal dan hati, kerusakan otak dan serangan jantung.

Aku jadi teringat, aku membaca sebuah artikel pada beberapa minggu lalu yang membahas 5 kota dengan udara terkotor di Indonesia. Kota yang kutinggali adalah salah satunya. Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang mengakibatkan udara di kotaku menjadi kotor (Oktaviani, 2024).

Sayangnya, informasi mengenai bahaya dari pembakaran sampah ini belum tersebar dengan baik. Minimnya pengetahuan masyarakat akhirnya mengakibatkan kegiatan nabun ini masih berlangsung. Selain terkait pembakaran sampah secara spesifik, akses informasi mengenai pengelolaan sampah secara keseluruhan juga jadi hal yang perlu diperhatikan untuk memberhentikan praktik-praktik yang kurang baik. Pengadaan TPS secara ilegal dan sangat berdekatan dengan pemukiman, misalnya.

Selain masyarakat, aktor lain yang tentunya mempunyai andil dalam permasalahan ini adalah pemerintah. Dilansir dari laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk dan wajib membiayai pengelolaan sampah. Artinya, dalam mewujudkan lingkungan bebas nabun dan pengelolaan sampah yang lebih baik, pemerintah dapat mengelola TPS dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan lebih baik serta memastikan bahwa masyarakat mengetahui dan bisa mengakses TPS dan TPA terdekat. Selebihnya, sampah yang terkumpul dapat dikelola agar tidak menumpuk belaka. Pemerintah pusat dan daerah juga dapat memberikan kompensasi maupun insentif bagi masyarakat yang mengambil peran lebih untuk mempraktikkan 3R, yakni *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* atau mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah.

Semoga tak ada asap hitam yang mengepung lingkungan kita!

REFERENSI

“Hati-hati, Membakar Sampah Bisa Membahayakan Kesehatan,” Alodokter. Diakses pada 29 Juni 2024, <https://www.alodokter.com/hati-hati-membakar-sampah-bisa-membahayakan-kesehatan>

“Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 29 Juni 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html>

“STOP Dudurukan,” BPBD Kabupaten Bogor. Diakses 29 Juni 2024, <https://bpbdbogorkab.go.id/stop-dudurukan/>

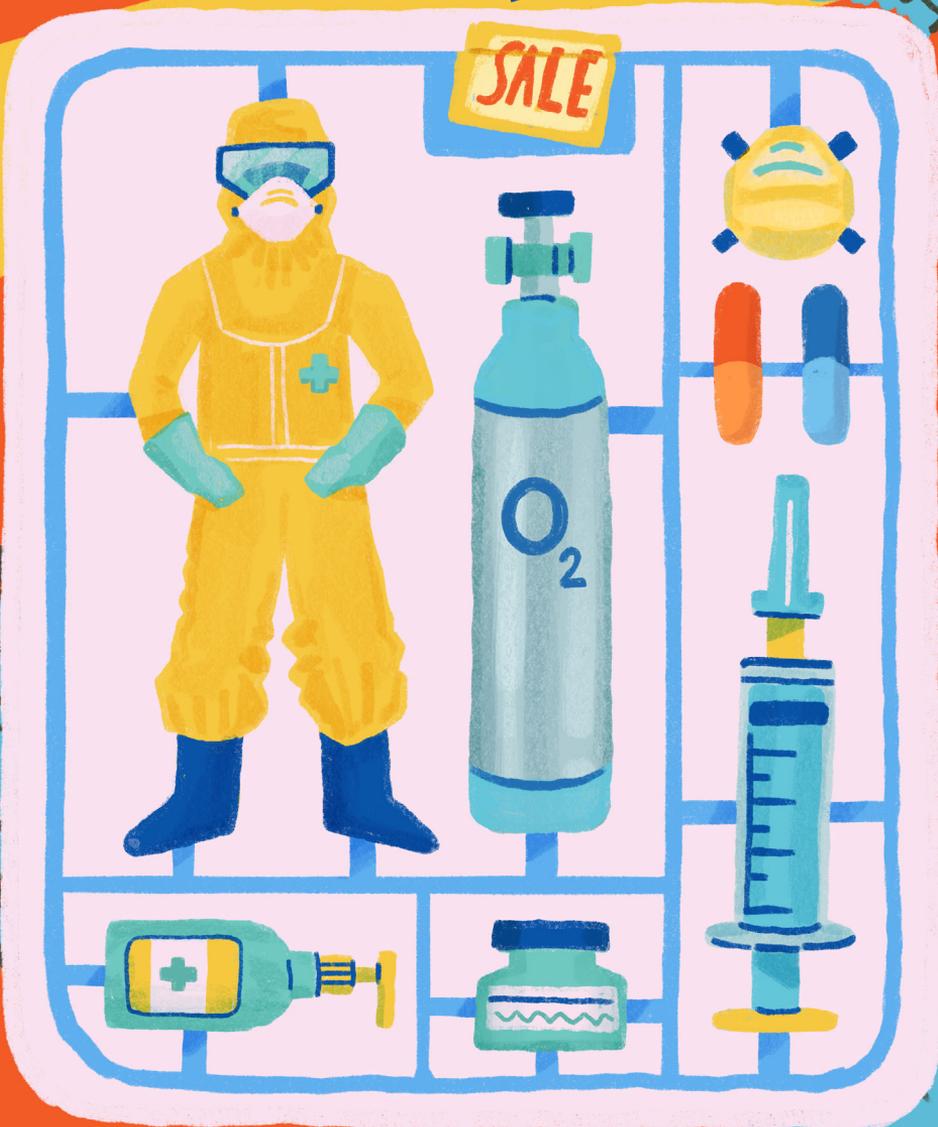
Oktaviani, Dwi. “Ini 5 Kota dengan Udara Terkotor di Indonesia Versi Nafas, Tangsel di Posisi Pertama,” Tangselife, 14 Juni 2024. Diakses 29 Juni 2024, <https://tangselife.com/news/ini-5-kota-dengan-udara-terkotor-di-indonesia-versi-nafas-tangsel-di-posisi-pertama>

Rahmatullah, Dimas Galih. “Nabun, Budaya Buruk yang Belum Tersohor Tapi Berdampak Mayor,” Kompasiana, 20 Oktober 2023. Diakses 29 Juni 2024,

https://www.kompasiana.com/dimasrahmatullah3498/653a6a89edff76538a254fd2/nabun-budaya-buruk-yang-belum-tersohor-tapi-berdampak-mayor?page=2&page_images=1

PANDEMI COVID 19

HIDUP-MATI MASYARAKAT
DI TANGAN PASAR



OLEH **ASTRIED PERMATA**

Tulisan ini pertama kali diterbitkan oleh IndoProgress pada Agustus 2021.

MENGINGAT KEMBALI NEOLIBERALISME

Untuk mengidentifikasi neoliberalisme di Indonesia, bahkan dalam situasi genting seperti pandemi, ada baiknya kita mengingat kembali sejarah dan karakteristik neoliberalisme. Neoliberalisme sudah berlangsung selama setengah abad setelah pertama kali dikemukakan oleh sekelompok intelektual yang terdiri dari ekonom, filsuf, dan sejarawan, yang menamakan dirinya the Mont Pelerin Society. Adalah Hayek, Friedman, Mises, dan kawan-kawannya yang berpendapat bahwa kebebasan berpikir dan berpendapat terancam oleh merosotnya kepercayaan terhadap hak milik pribadi dan persaingan pasar. Dengan kata lain, kesejahteraan manusia

(*human well-being*) dapat ditempuh dengan kebebasan berbisnis. Harvey menjelaskan kelompok-kelompok ini menentang teori-teori intervensionis negara dan kebijakan Keynesian yang mendukung subsidi. Mereka memandang negara memiliki keberpihakan atas kepentingan-kepentingan tertentu sehingga tidak akan mampu mengelola atau merespon gejala-gejala pasar (Harvey, 2009). Sebaliknya, peran negara justru mendukung praktik-praktik tersebut dengan mengatur struktur dan fungsi aparat negara, hukum, lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang berpihak pada pasar (Harvey, 2005). Harvey juga mengemukakan bahwa dalam sistem neoliberal, jika pasar tidak ada, seperti pada sektor-sektor publik yang berada di

tangan negara, termasuk pendidikan, kesehatan, pengelolaan air dan jaminan sosial, maka negara harus memfasilitasi terciptanya pasar di sektor-sektor tersebut. Dengan kata lain, pemerintah harus memberi izin privatisasi atau hak milik pribadi masuk ke sektor-sektor publik. Kapital harus dapat bergerak secara bebas antar sektor dan antar daerah. Jika ada sengketa atau konflik dalam pelaksanaannya, hal itu haruslah dimediasi lewat jalur hukum: pengadilan (Harvey, 2009).

EKSPLOITASI DI TENGAH KESUSAHAN RAKYAT

Merujuk karakteristik di atas, kita dapat menemukan setidaknya beberapa aktivitas kapitalis neoliberal dalam wajahnya paling buruknya, yang mendudukkan pemerintah dalam situasi harus berpihak pada kapital meski dalam situasi darurat.

Pertama, perihal kesehatan publik. Seperti yang telah kita ketahui, sistem kesehatan Indonesia yang seharusnya menjadi layanan publik, secara berangsur-angsur diserahkan kepada kapital dan dibiarkan bekerja dalam logika akumulasi kapital. Hal ini tidak hanya diindikasikan oleh privatisasi dan menjamurnya bisnis-bisnis layanan kesehatan, tetapi juga dengan disahkannya

Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi sederet Undang-Undang berkaitan dengan kesehatan, di antaranya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Pendidikan Dokter (Sulaiman, 2020). Dengan *Omnibus Law* ini, pemerintah membantu menciptakan iklim serta memudahkan jalan bagi pemilik kapital untuk mendirikan rumah sakit swasta dan bisnis-bisnis kesehatan lainnya demi mencapai surplus maksimal (Afandi, 2020). Peningkatan surplus tentunya dilakukan dengan menekan kelas pekerja (lewat pemangkasan upah dan pembatasan akses kepada layanan sosial, misalnya) dan memprioritaskan pelayanan bagi mereka yang mampu membayar.

Sistem kesehatan kapitalis jelas bekerja terbalik dengan sistem kesehatan tanpa kelas yang diaplikasikan di Kuba, yang berpusat pada *caring* dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat luas, termasuk kepada mereka yang berada di area-area pelosok. Sistem kesehatan Indonesia yang kapitalistik berorientasi hanya pada peningkatan surplus,

tidak peduli situasinya segenting apa. Sistem inilah yang melahirkan banyak petugas kesehatan yang berjuang mengatasi pandemi tanpa dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) yang memadai. Sistem ini juga yang membuat dokter dan perawat kelelahan, kewalahan, dan *burnout* menangani pandemi.

Memang, logika kapitalis yang berpijak pada argumen bahwa harga diperkenankan naik setinggi mungkin ketika angka permintaan melonjak tinggi, adalah logika yang sama sekali tidak bisa kita andalkan dalam situasi krisis, termasuk pandemi COVID-19. Logika ini dipakai oleh para pengusaha oksigen dan obat-obatan yang bisa kita temui dalam *marketplace* 'kesayangan' anda (Mola, 2021). Tinggal sebut si *oren*, si *ijo*, atau si merah. Kenaikan harga bahkan menyentuh angka 900% (Ramadhan, 2021). Hal yang sama juga dimanfaatkan oleh segelintir orang yang memiliki usaha kremasi. Di tengah permintaan yang tinggi seiring meroketnya kasus kematian karena COVID-19, beberapa pebisnis kremasi menaikkan harga jasanya berkali-kali lipat, dari Rp2,5 juta rupiah menjadi Rp65 juta rupiah (Wijaya, 2021).



Lebih lanjut, corak kapitalis juga dominan ke dalam perusahaan-perusahaan milik negara atau biasa dikenal dengan BUMN. Menterinya yang juga pengusaha, Erick Thohir, berkolaborasi dengan Menteri Kesehatan saat ini, Budi Gunadi (juga seorang pengusaha), melalui perusahaan farmasi Kimia Farma membuat skema vaksin berbayar dengan mengimpor 15 juta dosis vaksin Sinopharm. Kimia Farma menarik tarif Rp375.000 untuk dua kali suntikan (Idris, 2021). Vaksin 'gotong royong' ini diklaim memiliki efektivitas 78%, sedikit lebih tinggi dari vaksin yang banyak tersedia buat masyarakat. Vaksin berbayar ini difasilitasi pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 atas perubahan Permenkes sebelumnya tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (Kurinia, 2021). Awal Agustus 2021, Menteri Budi Gunadi kemudian mencabut Permenkes tentang vaksin bayar tersebut setelah Koalisi Sipil melayangkan somasi yang ditujukan kepada dirinya (Puspa, 2021; CNN Indonesia, 2021).

Tingkah Kimia Farma seperti ini bukan kali pertama. Sebelumnya, ia juga terlibat dalam negosiasi sengit

dengan Kementerian Kesehatan terkait produksi obat Antiretroviral (ARV) yang diperuntukkan bagi orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA). Kimia Farma dan Indofarma saat itu bersikeras menarik tarif produksi ARV empat kali lipat lebih tinggi dibanding harga pasaran (CNN Indonesia, 2019). Konflik ini menyebabkan stok ARV di beberapa daerah sempat kosong, sehingga berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup 600 ribu nyawa manusia.

Kedua, di tengah kekacauan ini, kapitalis juga masih terus mencari akumulasi kapital melalui proyek-proyek pembangunan pemerintah. Terdapat setidaknya 41 proyek yang masuk dalam daftar strategis nasional 2020–2024 pemerintah, termasuk 10 destinasi wisata 'Bali Baru', pembangunan 31 smelter, energi terbarukan berbasis kelapa sawit, Ibu kota negara, hingga pembangunan waduk dan bendungan (Freycinatia, 2020).

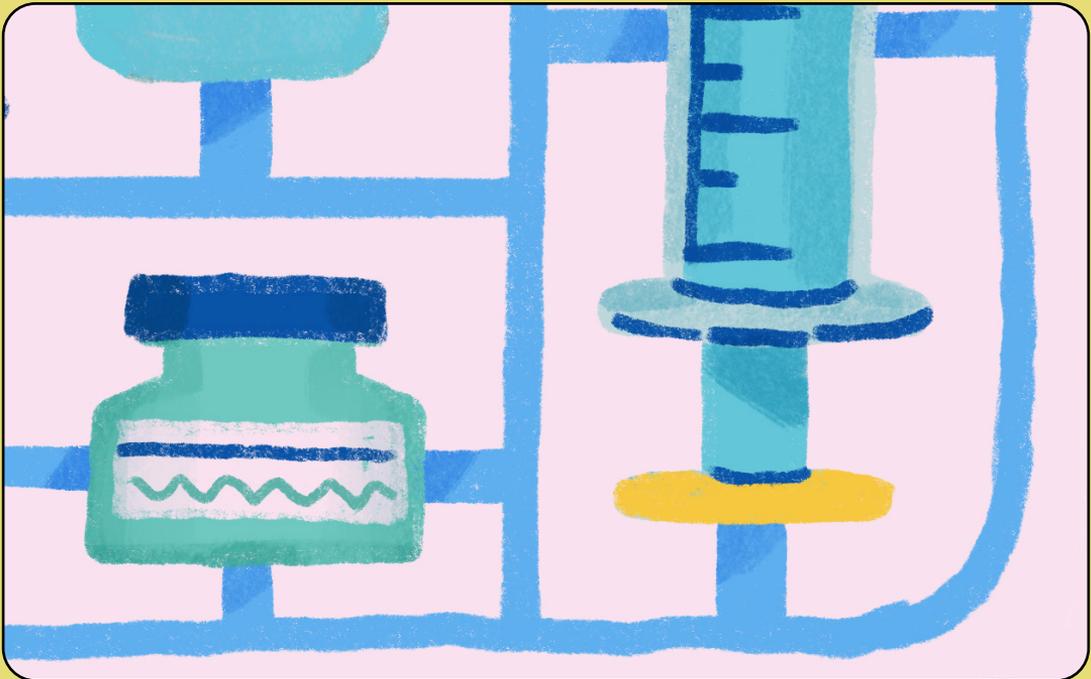
Pembangunan-pembangunan ini jelas dihujani protes dari warga lokal. Pembangunan sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara, misalnya, dengan atribut hukum dan aparat pemerintah melakukan penggusuran secara paksa terhadap masyarakat adat Sasak di

dusun Ai Bunut, Lombok Tengah. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebutkan masyarakat setempat menolak digusur dari kampung halamannya sendiri. Warga menolak lahannya dirampas dengan ganti rugi apapun karena mereka telah tinggal dan hidup di tanah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun (CNN Indonesia, 2021). Perampasan tanah masyarakat adat Sasak pun diwarnai dengan intimidasi, kekerasan, dan ancaman (BBC Indonesia, 2021). Masalah di salah satu proyek wisata 'Bali Baru' ini sempat dibawa ke ranah hukum. Tapi, apakah fungsi hukum dalam tatanan neoliberal? Toh, warga kalah di pengadilan.

Hal serupa juga dialami oleh masyarakat adat di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah nekat menjalankan proyek 'Jurassic Park' di Taman Nasional Komodo. Warga setempat yang hidup dan menjaga Komodo serta ekosistemnya secara turun menurun menolak keras pembangunan tersebut (Tempo.co, 2020). Foto yang menampilkan seekor Komodo yang sedang menghadang truk pun berhasil membuat pembangunan di area tersebut ditutup untuk umum (Prabowo,

2020). Meski mendapat kecaman dari masyarakat (dan juga UNESCO) atas pembangunan yang mengancam lingkungan dan ekosistem komodo, pemerintah tetap ngotot. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang lagi-lagi juga seorang pengusaha, Sandiaga Uno menampik tuduhan tersebut. Pada 6 Agustus 2021, dalam akun twitter resminya Sandiaga mengatakan pembangunan Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo telah mengedepankan aspek keberlanjutan dan tidak ketinggalan juga: aspek penciptaan lapangan kerja.

Baru-baru ini warga desa Wadas sedang berjuang di ruang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggugat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terkait pembangunan bendungan dan tambang andesit di Wadas. Pola yang sama, segelintir orang memaksa warga setempat keluar dari tanah mereka atas nama pembangunan yang konon dapat menciptakan efek 'menetes ke bawah', menghapus kemiskinan, dan membawakan kesejahteraan (Harvey, 2009). Cerita tentang warga Wadas, baik perempuan, orang muda, dan laki-laki, berbondong-bondong menjaga tanah mereka mati-matian dapat dilihat melalui kanal instagram di @wadas_melawan.



WARGA BANTU WARGA: KETERBATASAN DAN POTENSI

Di tengah terhimpitnya masyarakat atas segala semua kesusahan yang dihasilkan oleh neoliberalisasi, tak ada pilihan selain menggalang kekuatan komunal. Selama pandemi, warga mulai melakukan inisiatif penggalangan dana, membangun dapur-dapur umum, dan menyediakan secara gratis paket-paket obat isoman dan alat pelindung diri (APD).

Namun demikian, tanpa mengurangi rasa hormat atas nilai penting gerakan ini serta semangat juang kepedulian komunal, gerakan masyarakat Warga Bantu Warga bisa terjebak dengan

karakteristik neoliberalisme yang saya sebutkan di awal. Sebab, ia seolah mengafirmasi bahwa persoalan hak-hak ekonomi bukan urusan pemerintah melainkan individu/masyarakat itu sendiri, bahwa masyarakat punya kebebasan untuk memutuskan dan bertanggungjawab mengurus hidupnya melalui pasar.

Selain itu, alih-alih mengejar redistribusi kekayaan yang sebenarnya, dari segelintir orang di pucuk kelas atas sana, gerakan solidaritas ini berasal dari kantong-kantong masyarakat bawah yang juga sedang berjuang di tengah situasi yang serba sulit ini. Kelompok buruh misalnya, di tengah situasi kerja yang dibuat sangat fleksibel dan upah

yang semakin kecil karena kerja paruh waktu saat pandemi, mereka bersolidaritas membantu buruh lain yang mengalami kesulitan lebih besar.

Dilihat dari perspektif neoliberal, praksis gerakan solidaritas semacam ini mengukuhkan keputusan pemerintah yang pada awal masa pandemi menghindari kebijakan *lockdown*/karantina wilayah. Presiden Jokowi memilih terminologi PSBB atau PPKM dan terminologi lain, asal bukan karantina wilayah/*lockdown*, agar terhindar dari tanggung jawab pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan makanan hewan ternak selama masyarakat melakukan karantina wilayah. Kewajiban pemerintah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Wilayah (Poerana, 2020).

Tak heran jika berbagai inisiatif yang didasari ketulusan warga ini mendapatkan apresiasi dari Pemerintah (Portal Informasi Indonesia, 2020). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bahkan memberikan penghargaan kepada inisiatif-inisiatif pelayanan publik di tengah COVID-19. Terdapat 144

inovasi berasal dari masyarakat sipil yang Kemenpan-RB catat pada 2020.

Di sisi lain, penting kemudian untuk melihat sikap Solidaritas Pangan Jogja (SPJ) yang dengan kritis menolak gimik dari pemerintah tersebut. Mereka menolak diberikan penghargaan oleh Kemenpan-RB. Safiatudina, perwakilan SPJ, mengatakan enggan menerima penghargaan tersebut karena gerakan SPJ hadir sebab pemerintah dinilai tak mampu memberikan akses kesehatan, pangan dan kesejahteraan masyarakat (Setyono, 2020). Sebuah sikap kritis yang juga tidak banyak ditemukan saat ini.

Namun, di luar segala keterbatasannya, inisiatif Warga Bantu Warga dan solidaritas komunal sejenis, memiliki potensi besar untuk menjadi momen pembangunan kesadaran kelas sehingga menjadi kekuatan politis baru. Jika dicerabut dari kerangka survivalisme, inisiatif-inisiatif ini bisa menjadi instrumen politik dalam kerangka praksis yang lebih luas dan berjangka panjang, misalnya menopang kehidupan sehari-hari saat berlangsung pemogokan massal. Inilah kemudian yang menjadi pekerjaan rumah bersama yang lebih besar: *merumuskan kembali aksi-aksi kolektif yang bertaji*

dan mampu bertahan lama dengan instrumen-instrumen politik yang telah ditemukan dan diujicobakan. Benar bahwa sistem kapitalis tidak bisa diandalkan sama sekali terlebih dalam situasi krisis. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya dan refleksi lebih lanjut untuk merumuskan strategi yang lebih sistematis untuk keluar darinya.

Pemerintah sudah memilih untuk melayani kepentingan neoliberal. Ini tidak hanya terlihat dari sikapnya yang menghindari kebijakan *lockdown*/ karantina wilayah, tetapi juga dari pilihan menempatkan orang-orang pro-investasi daripada pakar kesehatan

publik sebagai pucuk pimpinan Satuan Tugas COVID-19. Misalnya, Airlangga Hartanto dan Luhut Pandjaitan.

Pandemi mengajarkan kita betapa keroposnya kapitalisme bahkan dalam wajah barunya: neoliberalisme. Sikap pemerintah untuk memilih berpihak pada akumulasi kapital alih-alih memenuhi kebutuhan masyarakat justru memperlihatkan kegagalan pemerintah yang paling fatal. Ia membiarkan 100 ribu orang meninggal dan jutaan keluarga terkatung-katung nasibnya. Inilah gambaran masyarakat yang dijanjikan neoliberalisme akan sejahtera dan bebas di tangan pasar.

REFERENSI

"Gagal Lelang Pemerintah dan Ancaman Putus Obat untuk ODHA", CNN Indonesia, diakses pada 6 Agustus 2021, melalui <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190114122726-255-360623/gagal-lelang-pemerintah-dan-ancaman-putus-obat-untuk-odha>

"Koalisi Sipil Somasi Menkes Cabut Aturan Vaksin Berbaya", CNN Indonesia, diakses pada 14 Agustus 2021, melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210730142018-20-674330/koalisi-sipil-somasi-menkes-cabut-aturan-vaksin-berbayar>

"Komodo Adalah Saudara Kami: Penolakan Pembangunan Jurassic Park di Pulau Komodo", Tempo.co, diakses pada 7 Agustus 2021, melalui <https://www.tempo.co/abc/5969/komodo-adalah-saudara-kami-penolakan-pembangunan-jurassic-park-di-pulau-komodo>

"Mandalika: Pembangunan Proyek Sirkuit Dituding Melanggar HAM, 'Hak Belum Dipenuhi Tapi Pembangunan Jalan Terus, Ini Pemaksaan", BBC Indonesia, diakses pada 7 Agustus 2021, melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56639620>

"Penolakan Warga dan Dugaan Proyek Mandalika Langgar HAM", CNN Indonesia, diakses pada 7 Agustus 2021, melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210408144705-20-627508/penolakan-warga-dan-dugaan-proyek-mandalika-langgar-ham>

Afandi, "Pengaturan Rumah Sakit dan Kesehatan di Omnibus Banyak yang Belum Selaras", Muhammadiyah, diakses pada 6 Agustus 2021, melalui <https://muhammadiyah.or.id/pengaturan-rumah-sakit-dan-kesehatan-di-omnibuslaw-banyak-yang-belum-selaras/>

Freycinetia, F. "Ini Daftar 41 Proyek Prioritas yang akan Dibangun hingga 2024", Bisnis.com, diakses pada 6 Agustus 2021, melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200224/9/1205151/ini-daftar-41-proyek-prioritas-yang-akan-dibangun-hingga-2024>

Harvey, D. "A Brief History of Neoliberalism", Oxford University Press, New York: 2005.

Harvey, D. "Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis", Resist Book, Yogyakarta: 2009.

Idris, M. "Kimia Farma Impor 15 Juta Vaksin Berbayar dari Sinopharm", Kompas.com, diakses pada 6 Agustus 2021, melalui <https://money.kompas.com/read/2021/07/14/060411626/kimia-farma-impor-15-juta-vaksin-berbayar-dari-sinopharm?page=all>

Kurinia, A. M. "Jokowi Cabut Vaksinasi Berbayar, Ini Komentar Kimia Farma", Kompas.com, diakses pada 6 Agustus 2021, melalui <https://money.kompas.com/read/2021/07/16/200527926/jokowi-cabut-vaksinasi-berbayar-ini-komentar-kimia-farma>

Mola, T. "YLKI Desak Pemerintah Awasi Harga Obat, Vitamin, dan Oksigen", Bisnis.com, diakses pada 6 Agustus 2021, melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210711/12/1416258/ylki-desak-pemerintah-awasi-harga-obat-vitamin-dan-oksigen>

Poerana, S. A. "Hak Rakyat Jika Terjadi Lockdown", Hukumonline.com, diakses pada 8 Agustus 2021, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e74a69e9bf8d/hak-rakyat-jika-terjadi-i-lockdown-i/>

Portal Informasi Indonesia, "Solidaritas Pangan, Gotong Royong Berbagi di Tengah Pandemi", Indonesia.go.id, diakses pada 8 Agustus 2021, melalui <https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/2037/solidaritas-pangan-gotong-royong-berbagi-di-tengah-pandemi>

Prabowo, D. "Setelah Viral Foto Komodo Hadang Truk, Jalur Pembangunan Jurassic Park Bakal Diamankan", Kompas.com, diakses pada 7 Agustus 2021, melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/29/07371431/setelah-viral-foto-komodo-hadang-truk-jalur-pembangunan-jurassic-park-bakal?page=all>

Puspa, H. "Menkes Resmi Cabut Aturan Vaksinasi COVID-19 Berbayar untuk Individu", Kompas.com, diakses pada 14 Agustus 2021, melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/09/10293901/menkes-resmi-cabut-aturan-vaksinasi-covid-19-berbayar-untuk-individu?page=all>

Ramadhan, D. I. "Terlalu!, Obat-Oksigen Dijual Mahal Via Online Saat PPKM Darurat", Detik.com, diakses pada 6 Agustus 2021, melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5635644/terlalu-obat-oksigen-dijual-mahal-via-online-saat-ppkm-darurat>

Sulaiman, R. "Bukan Hanya Buruh, Sektor Kesehatan Juga Terdampak Berat UU Cipta Kerja", Suara.com, diakses pada 6 Agustus 2021, melalui <https://www.suara.com/health/2020/10/09/205025/bukan-hanya-buruh-sektor-kesehatan-juga-terdampak-berat-uu-cipta-kerja?page=all>

Setyono, K. "Bagikan Nasi Saat Pandemi, SPJ Tolak Penghargaan Kementerian", Gatra.com, diakses pada 8 Agustus 2021, melalui <https://www.gatra.com/detail/news/497211/gaya-hidup/bagikan-nasi-saat-pandemi-spj-tolak-penghargaan-kementerian>

Wijaya, L. D. "Dugaan Kartel Kremasi Jenazah COVID-19 di Jakarta, Tarif Dipatok Rp 45-65 Juta", Tempo.co, diakses pada 8 Agustus 2021, melalui <https://metro.tempo.co/read/1484564/dugaan-kartel-kremasi-jenazah-covid-19-di-jakarta-tarif-dipatok-rp-45-65-juta/full&view=ok>



Kiamat dari, oleh, dan untuk Manusia

OLEH

REHANN

Saya tumbuh besar dengan banyak sekali kecemasan di kepala, salah satunya akan terjadinya kiamat. Kecemasan ini tumbuh kian pesat dalam diri saya sejak tahun 2010. Pada tahun itu, televisi dipenuhi tayangan kabar kiamat. Dari peramal bernama Mama Lauren hingga kalender Suku Maya, semuanya bersepakat akan satu hal: dunia akan berakhir pada tahun 2012 karena bencana maha dahsyat. Melewati masa pubertas dengan kecemasan “kiamat sudah dekat”, saya jadi gemar mengonsumsi hal-hal terkait kiamat. Mulai dari ragam teori konspirasi, kisah-kisah fiksi, prediksi ilmuwan, mitologi, sampai dogma-dogma agama tentang akhir dari seluruh kehidupan di alam semesta. Saya gemar memberikan kecemasan saya sendiri.

Pengetahuan-pengetahuan itu kemudian saya uji kembali ketika saya menjejakan kaki di kampus. Kepala saya kemudian disesaki dengan banyak doktrin tentang krisis iklim, ancaman perang nuklir, juga banyak isu sosial lain yang berakar dari keserakahan manusia. Pengetahuan-pengetahuan yang baru saya terima ini, menggeser paradigma saya tentang kiamat. Boleh jadi kiamat tidak terjadi karena galaksi yang saling bertabrakan, atau mungkin kiamat memang tidak sesederhana

bumi menyerah lalu menghancurkan dirinya. Kiamat terjadi karena manusia menciptakan kiamat-kiamatnya sendiri. Persis seperti apa yang terjadi di Malang, 1 Oktober 2022. Tragedi Kanjuruhan, adalah kiamat yang diciptakan oleh manusia sendiri.

PELUIT SANGKAKALA DI STADION BOLA

Mitologi Nordik meyakini kiamat bagi manusia di bumi terjadi akibat imbas dari Ragnarok, sebuah pertempuran besar antara para dewa dan makhluk mitologi lainnya. Mulanya, saya hendak menyamakan pertempuran ini dengan pertandingan antara Arema Malang melawan Persebaya pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Jawa Timur. Mengingat rivalitas kedua klub region Jawa Timur tersebut telah berlangsung lama, juga pecahnya rekor Arema yang sebelumnya belum terkalahkan di kandang, rasanya cocok untuk menyebut pertandingan tersebut seolah pertempuran antar dewa di Ragnarok.

Pertandingan yang dijadwalkan larut malam itu berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Persebaya. Skor tersebut menandai kekalahan pertama Arema melawan rivalnya di Kanjuruhan setelah 23 tahun. Dari

satu potongan peristiwa ini, gambaran kekecewaan suporter Arema boleh jadi validasi bagi mereka untuk melakukan tindak rusuh dan kekerasan. Tapi kepada siapa? Pertandingan ini sudah dijadwalkan tanpa kehadiran Bonek, sebutan untuk suporter Persebaya. Kerusuhan yang disebabkan pertandingan ini kemungkinan tidak akan menyebabkan korban jiwa berjatuhan. Toh, semua penonton yang hadir di stadion hanyalah suporter Arema, Aremania. Maka, jika mengacu pada mitologi Nordik, pertandingan ini seharusnya tidak menjadi kiamat.

Pertandingan Arema melawan Persebaya berlangsung hingga selesai tanpa jatuhnya satu pun korban. Akhir dari pertandingan ini ditandai dengan tiupan peluit panjang oleh wasit Agus Fauzan Arifn. Wasit yang memiliki latar belakang sebagai tentara ini telah menjadi sorotan suporter Persebaya sebelum laga dimulai. Meski memberikan banyak keputusan yang di atas kertas terlihat menguntungkan Arema, dengan tiga kartu kuning dan hukuman sepak penalti untuk Persebaya, kemenangan tetap menjadi milik tim tamu hingga pertandingan selesai. Namun bak sangkakala dalam Islam, pekik peluit panjang yang ditiupkan oleh Agus menjadi penanda awal datangnya rentetan bencana menuju kiamat.

Sampai saat ini saya belum menemukan kisah tentang kiamat yang terjadi akibat tidak adanya ketertiban umum di tengah masyarakat. Sehingga tulisan ini akan meloncati detail kejadian pasca peluit panjang yaitu invasi lapangan yang dilakukan oleh beberapa suporter Arema.



Polisi menggunakan rompi berwarna hijau-kekuningan & memegang senapan gas air mata yang diarahkan ke tribun penonton di Stadion Kanjuruhan, 1 Oktober 2022 (law-justice.co/Tunggadewi)



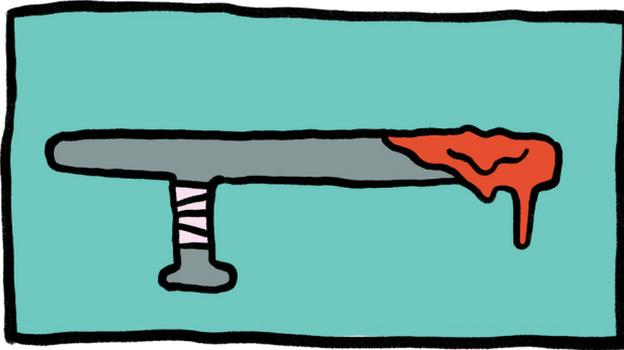
Menurut beberapa laporan, tindakan suporter Arema yang turun ke lapangan bukan ditujukan untuk mengancam keselamatan. Aremania hendak menyemangati tim kesayangannya pasca kekalahan memalukan itu. Kiamat terjadi setelah salah satu dari *The Four Horsemen* atau Empat Penunggang Kuda Akhir Zaman, yang dalam kepercayaan Kristen merupakan pembawa bencana kiamat, menembakkan gas air mata ke tribun penonton.

Empat Penunggang Kuda Akhir Zaman, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Wahyu (6:1-8), melambangkan bencana penaklukan, perang, kelaparan, dan kematian. Penunggang kuda keempat, sang pembawa kematian, digambarkan menunggangi kuda hijau-kekuningan nan pucat, layaknya polisi yang seharusnya bertugas menjaga dan mengamankan nyawa ribuan orang di stadion itu. Di malam itu, polisi juga lah yang merespon

tindakan suporter yang menginvasi lapangan dengan brutal. Ia tidak hanya memukul dan menginjak-injak tubuh suporter, ia juga menembakkan gas air mata dan mengunci pintu keluar stadion. Mereka membawa kematian ke lebih dari puluhan orang di satu waktu dan satu tempat secara bersamaan.

PENUNGGANG KUDA KEEMPAT

Satu hari setelah pertandingan, ratusan orang dinyatakan meninggal dunia. Kiamat telah usai berlangsung di stadion bola. Kiamat yang menjadi peristiwa kematian terbesar di stadion dalam 50 tahun terakhir. Bencana terbesar nomor dua dalam sejarah sepakbola dunia. Kondisi ini membuat publik geram dan media sosial menyediakan tempat bagi publik bersimpati maupun protes atas insiden tersebut. Penelitian yang dilakukan Gusti et al. (2023) mencatat percakapan publik di sosial media



Twitter (X) dalam rentang 1-9 Oktober 2022 terkait tagar #PrayForKanjuruhan. Dalam laporan itu, 3 kata kunci yang paling banyak diperbincangkan pengguna Twitter yaitu *Arema*, *PSSI*, dan *polisi* dengan sentimen kritis.

Ketiga institusi yang menjadi sorotan publik yaitu Arema, PSSI, dan polisi adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi di Malang, 1 Oktober 2022. Namun, dalam upaya untuk menemukan jawaban maupun solusi, langkah awal yang harus dilakukan adalah memetakan masalah yang ditimbulkan masing-masing pihak tersebut. Pemetaan masalah tidak ditujukan untuk melepaskan tanggung jawab semua pihak yang terlibat melainkan bertujuan untuk menuntut pertanggung jawaban yang tegas kepada pihak-pihak terkait. Pemetaan masalah telah dilakukan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) bentukan Presiden Joko Widodo.

TGIPF yang diketuai langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD telah merilis laporan dan temuannya. Dalam laporan itu, TGIPF telah merilis siapa-siapa saja pihak yang berperan dalam terjadinya tragedi 1 Oktober 2022 dan bagaimana pihak-pihak tersebut harus bertanggung jawab. Di dalamnya termasuk juga catatan untuk PSSI, Panitia Penyelenggara, sederet Kementerian, hingga TNI dan Polri. Namun pada tulisan ini saya akan mengajak anda fokus kepada kelalaian yang dilakukan “*oknum*” polisi, si Penunggang Kuda Keempat.

Silahkan lanjutkan pembacaan kamu tentang laporan tersebut. Namun singkatnya, bagi saya, laporan TGIPF tidak tegas dalam memberikan kesimpulan dan rekomendasi terkait tragedi Kanjuruhan, terutama terkait dengan tanggung jawab aparat keamanan yang telah menembakkan gas air mata ke arah tribun. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

(KontraS) misalnya, menyayangkan hasil laporan TGIPF yang tidak meng-kategorikan peristiwa ini sebagai suatu peristiwa pelanggaran HAM berat. Tapi, apakah polisi memang tidak bersalah jika menembakan gas air mata ke tribun penonton?

Seperti telah dipaparkan sebelumnya, “polisi” menjadi salah satu kata kunci yang paling banyak diperbincangkan pengguna Twitter. Salah satu topik terkait kata “polisi” yang muncul di laman Twitter saya adalah perdebatan mengenai apakah tepat tindakan polisi yang menembakan gas air mata ke arah tribun? Dalam gelembung algoritma saya, argumen mayoritas adalah kontra. Namun, ada juga sebagian pengguna media sosial yang berargumentasi pro terhadap tindakan tersebut karena polisi hanya menjalankan Protokol Keamanan dan tidak mengetahui regulasi FIFA tentang standar pengamanan stadion.

Kesimpulan dalam laporan TGIPF seolah-olah hendak menjustifikasi argumentasi ketidaktahuan polisi terkait larangan penggunaan gas air mata di dalam stadion menurut regulasi FIFA. Argumentasi ini memang masuk akal mengingat temuan lain yaitu kelalaian PT LIB yang tidak melakukan pengecekan kompetensi saat menunjuk *security officer*. Namun, argumen ini dapat terbantahkan oleh kesimpulan nomor D dalam laporan TGIPF, yaitu polisi tidak melaksanakan pedoman Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Selain itu, polisi melanggar beberapa peraturan lainnya seperti

langkah-langkah pengamanan massal yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, serta penerapan standar dan prinsip hak asasi manusia dalam tugas kepolisian yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009.

Membenarkan tindakan polisi untuk menembakkan gas air mata ke tribun penonton hanya karena polisi tidak mengetahui regulasi FIFA yang melarang penggunaan gas air mata di stadion itu sama saja seperti membenarkan tindakan orang merokok di dalam ruang IGD hanya karena orang itu tidak melihat ada tanda dilarang merokok ada di ruangan IGD. Kelalaian polisi yang mengabaikan tiga Peraturan Kapolri sekaligus dan berakibat pada hilangnya ratusan nyawa malam itu tidak dapat dibenarkan.

Kelalaian ini diperparah dengan temuan TGIPF yaitu barang bukti selongsong amunisi gas air mata yang sudah kadaluarsa. Penggunaan amunisi gas air mata juga telah diakui oleh Polri pada konferensi pers di Mabes Polri Senin, 10 Oktober 2022. Namun, pengakuan ini disertai dengan sangkalan bahwasanya gas air mata yang sudah kedaluwarsa dikatakan menjadi berkurang efek bahayanya. Padahal, gas air mata kedaluwarsa justru makin berbahaya akibat perubahan reaksi senyawa yang terjadi di dalam tabungnya (Rothenberg et al., 2016).

Gas air mata idealnya digunakan untuk membubarkan kerumunan massa yang tidak dapat dikontrol oleh aparat keamanan. Dalam usaha pembubaran tersebut, aparat keamanan harus memiliki pertimbangan terkait bagaimana jalur massa untuk membubarkan diri. Berbeda dengan kerumunan di jalan (*street crowd*) atau lapangan tanpa sekat yang memungkinkan massa mundur agar terhindar dari gas air mata, lautan massa dalam stadion tidak bisa mundur begitu saja. Tidak ada jalan lagi selain mengikuti arus berebut pintu keluar (Kenny et al., 2001). Menembakkan gas air mata ke arah tribun dan lapangan, dan bukan perang antar dewa lah, yang memaksa kerumunan menemui kiamatnya.



BENCANA DARI, OLEH, DAN UNTUK MANUSIA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat selama tahun 2022, terjadi 3.544 bencana alam di seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember, BNPB mencatat sebanyak 858 orang meninggal dunia akibat bencana alam. Namun jika mengacu pada definisi kata bencana menurut BNPB yaitu, “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis,” maka hendaknya BNPB menambahkan

135 jumlah korban kiamat di Kanjuruhan ke dalam catatan korban jiwa akibat bencana.

Saya tumbuh besar dengan banyak sekali kecemasan di kepala, salah satunya akan terjadinya kiamat. Entah itu karena galaksi yang saling bertabrakan, atau bumi menyerah lalu menghancurkan dirinya. Tapi boleh jadi, kiamat terjadi karena manusia menciptakan kiamat-kiamatnya sendiri. Dan dalam peristiwa Kanjuruhan, kiamat diciptakan oleh sekelompok manusia bernama polisi.

REFERENSI

Darma, D. C., Nurjanana, N., Purwinahyu, P., & Busari, A. (2024) "Kanjuruhan tragedy: Revolution ensuring security and safety systems in Indonesian football," *International Journal of Physical Education, Sports and Health*, 11(3), p. 235–240. Tersedia di: <https://doi.org/10.22271/kheljournal.2024.v11.i3d.3346>

Kenny, J.M., McPhail, C., Waddington, P., Heal, S., Ijames, S., Farrer, D.N., Taylor, J. and Odenthal, D., 2001. Crowd behavior, crowd control, and the use of non-lethal weapons. *Penn State Applied Research Laboratory, Tech. Rep. A*, 274644.

Lassa, J., & Yusainy, C. (2023) "Tragedi Stadion Kanjuruhan: Kenapa Dan Bagaimana "stampede" Menelan Begitu Banyak Korban Setelah Kompetisi Sepak bola?" *The Conversation*, 4 Oktober. Tersedia di: <https://theconversation.com/tragedi-stadion-kanjuruhan-kenapa-dan-bagaimana-stampede-menelan-begitu-banyak-korban-setelah-kompetisi-sepak-bola-191765> (Diakses pada: 5 Agustus 2024)

Martinadhia, D.T., Rusyda, M.H. and Dan Saputra, R.H.H., *Kanjuruhan Stadium Tragedy: A Brief Analysis From Legal Perspective. International Journal Of Latest Research In Humanities And Social Science*, 5(10).

Perdana, G.N.R., Irawan, B. and Akbar, P., 2023. #PrayForKanjuruhan On Twitter: Public Response to the Kanjuruhan Stadium Disaster. *Nyimak: Journal of Communication*, 7(1), pp.89-107.

Rothenberg, C., Achanta, S., Svendsen, E.R. and Jordt, S.E., 2016. Tear gas: an epidemiological and mechanistic reassessment. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1378(1), pp.96-107.

Sadikin, J.M., Budianto, A., Ozora, A., Santoso, F.T.M. and Marceliani, R., 2024. Judicial and Criminology Review of the Post-Election Riots in 2019 and the Kanjuruhan Tragedy in 2022 As Signs of Mass Crimes Followed By Demonstrations. *Tadulako Law Review*, 9(1), pp.299-313.

IN

Seri
Fotografi
Performans
oleh **KIFU**

RED

THE ZONE



Seri fotografi ini diproduksi pada tahun 2021 di Zona Merah. Wilayah terlarang setelah peristiwa Tsunami tahun 2018 di teluk Palu. Sebelum itu, Zona Merah adalah salah satu titik pusat keramaian di kota. Pemerintah kota juga membangun banyak infrastruktur ruang publik seperti pusat rekreasi dan beberapa anjungan pantai.







Padahal arsip sejarah tentang jejak tsunami di wilayah itu ada, bahkan di cerita rakyat (bomba talu/tiga gelombang). Kini pemerintah kota meletakkan tanda larangan beraktivitas di sepanjang pantai. Namun, Zona Merah nampaknya terlanjur menjadi ruang yang terus diintervensi secara spasial oleh warga kota hingga saat ini.



Fotografi ini menggunakan pendekatan seni performans dengan membingkai tubuh dan ruang di zona merah untuk mengartikulasikan refleksi dan pengalaman spasial sebagai manusia yang pernah mengalami peristiwa ruang tersebut.

IN FRAME Leu Wijee

ORIGINAL FORMAT 10.6 x 8.4 cm

Monochrome Fujifilm Instax Wide

Alam yang Riu, Alam yang Bersuara

OLEH TITAH AW





Suasana hutan setelah hujan ternyata serupa pertunjukan orkestra yang amat megah.

Pada mulanya hanya suara tonggeret–satu, lalu belasan, lalu puluhan, lalu ribuan, berderik-derik bersahut-sahutan tak terputus. Sejurus kemudian, angin menyibak awan seperti tirai panggung, membiarkan kolom-kolom sinar matahari masuk. Bersama itu, gemerisik daun dan ranting ikut melapisi udara. Lalu muncul ansambel berikutnya: kicau burung-burung segala rupa. Ciap-ciap, cit-cit, kuk-kuk, kreek-kreek, mip-mip-mip, dan entahlah apa lagi. Setiap kicau yang berbeda saling menjalin. Di pucuk-pucuk pohon, owa dan monyet saling berseru-seru. Mendongak, terlihat sekelebat burung hitam terbang membenteng sayap, lebar, mungkin elang, atau rangkong. Membungkus

semuanya, deras suara aliran air di kejauhan sampai pula ke telinga.

Siang itu saya yang basah kuyup di tengah hutan kaki Pegunungan Cycloops, Papua, merasa terkejut. Bahkan setelah sekian kali jalan-jalan ke hutan, dalam benak saya lagi-lagi saya berucap, “Ternyata hutan ramai sekali ya!”

Suara hutan, ternyata jadi pengalaman yang selalu membekas setiap kali saya ke hutan. Perasaan yang sekilas normal, tapi ketika ditelisik lebih dalam, menimbulkan pertanyaan: Bukankah seharusnya kamu sudah tahu kalau hutan itu ramai? Kenapa kamu harus terkejut? Memangnya sejak kapan kamu menganggap hutan itu sepi?



Mungkin keterkejutan ini hadir karena secara tak sadar dalam benak saya tertanam sebuah pemahaman bahwa hutan itu karena tidak adanya manusia di sana—pasti merupakan ruang yang sepi. Dalam lapisan lebih dalam, keterkejutan ini barangkali disebabkan pengetahuan modern yang melingkupi saya sejak kecil, yang secara terus-menerus mencoba membangun konstruksi pemikiran bahwa “hutan itu sepi”, “hutan itu kosong”, atau dalam skala lebih luas, “alam itu tak bersuara-bisu”.

Meski terdengar sepele, pemahaman seperti itu ternyata punya sebab dan akibat yang jauh lebih besar dalam konteks perwujudan relasi kita sebagai manusia modern dengan alam.

Kelak, dalam sebuah buku brilian berjudul “The Nutmeg’s Curse” yang ditulis oleh cendekiawan asal India, Amitav Ghosh, saya menemukan sebuah terma yang ternyata beresonansi

dengan hal di atas: “*Muting the brute*” dan “*Exterminate all the brute!*”

Brute, dalam penjelasan Ghosh, adalah kata yang bertransisi dari bahasa Latin “*Brutus*” ke bahasa Prancis “*Brut*”, lalu ke bahasa Inggris “*Brute*” yang ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mendekati kata “kasar”, “lamban”, “bodoh”, “tidak punya kemampuan merasakan atau menalar”, atau malah “tidak beradab”. Dulu, kata “*brute*” digunakan secara umum untuk hewan. Baru sekitar abad 14-15an, para orang kulit putih memperluas penggunaan “*brute*” untuk juga mendeskripsikan manusia—dalam satu klasifikasi bersama hewan dan benda-benda alam. Artinya, “*Muting the brute*” dan “*Exterminate all the brute*” dalam hal ini bisa dimaknai dengan membungkam alam, memusnahkan yang tidak beradab, atau secara gamblang, menganggap alam sebagai sesuatu yang bersifat material semata—tidak hidup, dan karenanya tidak punya suara, tidak punya agensi, tidak punya makna.



Menariknya, perluasan makna kata ini bersamaan dengan masa di mana negara-negara Eropa seperti Belanda, Italia, Portugis, Inggris, dan Spanyol melakukan ekspedisi besar-besaran ke seluruh penjuru dunia untuk memulai kolonialisme. Sementara, jika secara linguistik terjadi perubahan makna, maka hampir bisa dipastikan bahwa gagasan soal membungkam alam ini juga menjadi gagasan sentral yang sedang berkembang di Eropa saat itu.

“Muting the brute”, bisa dibilang menjadi pemahaman yang membayangi arus kolonialisme dan mendasari aksi-aksi yang dilakukan Eropa di negeri-negeri jajahannya: melakukan pembantaian terhadap masyarakat adat, memabat hutan, merusak sungai, menghapus identitas kultural, sampai mengubah seluruh lanskap negara koloninya.

Karena, menurut Ghosh, proses kolonialisme sesungguhnya tidak sekedar proses membangun dominasi atas orang-orangnya, tapi juga proses

menundukkan dan mereduksi lanskap alam negeri jajahan menjadi “benda mati”. Padahal, kita tahu bahwa hampir seluruh masyarakat adat yang hidup mengandalkan lanskap alamnya selalu meyakini bahwa alam semesta adalah makhluk hidup—punya agensi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan membangun makna.

Pandangan bahwa alam ini hidup sudah kita ketahui dan banyak kita temukan di kehidupan masyarakat adat atau masyarakat yang masih hidup dengan menghormati alam. Misalnya lewat cerita-cerita soal tempat persemayaman leluhur, pohon-pohon yang menolak ditebang, batu-batu yang tidak bisa dihancurkan, kesurupan massal yang melanda para pekerja proyek yang destruktif, hingga salah satu contoh populernya yaitu cerita soal gunung api Banda yang tiba-tiba meletus saat kapal Portugis pertama memasuki perairannya. Tua-tua di sana menganggap Sang Gunung Api sedang

memberi pertanda, ada hal buruk yang dibawa kapal-kapal asing ini.

Hampir seluruh ritual adat pun, kita ketahui sebagai bentuk komunikasi antara manusia dan alam yang melingkupinya. Berbagai momen penting seperti menanam, panen, lahir, menikah, pindah rumah, bahkan sampai mati pun, dilakukan masyarakat adat dengan menggandeng alam raya sebagai pihak yang juga punya suara, punya agensi dan terlibat aktif dalam setiap peristiwanya.

Akeel Bilgrami, seorang filsuf, mengatakan bahwa proses “*Muting the brute*” ini esensial dalam praktek kolonialisme. Karena hanya dengan melihat alam sebagai benda mati, para penjajah itu bisa menghapus keterikatan moral dan praktisnya, sehingga bisa melihat apapun yang ada di negeri jajahan sebagai semata-mata: sumber daya.

Sayangnya, meski secara formal negara-negara jajahan kini telah merdeka, termasuk Indonesia, gagasan bahwa “alam itu mati” nyatanya masih langgeng.

Kita bisa melihat buktinya pada deretan berita-berita konflik lahan dan pembangunan di seantero Indonesia, misalnya. Dengan gamblang kita bisa melihat bagaimana negara menciptakan kebijakan-kebijakan politik yang mendukung industri yang eksploitatif dan merusak alam, mengeluarkan konsesi tambang, alih fungsi lahan, dan bahkan pariwisata di hutan-hutan adat, seolah-olah itu lahan kosong.

Ketumpulan atau kebutaan kita terhadap kehidupan di alam ini oleh Vandana Shiva, seorang ekofeminis, disebut sebagai *Bio-blindness*. Sayangnya, semakin dipikirkan, semakin banyak saya mendapati wujud kebutaan ini di kehidupan sehari-hari kita. Keterkejutan saya soal suara hutan itupun, merupakan contoh produk turunan *bio-blindness* yang perlu secara konsisten saya bongkar, bersama dengan konstruksi-konstruksi pemikiran lain yang ternyata masih menyimpan ampas-ampas penjajahan di dalamnya.

Betapa peradaban modern kita telah membungkam alam dan mereduksinya menjadi benda mati. Dan betapa pandangan ini telah membawa kita menyongsong bencana demi bencana.

Barangkali, sebenarnya yang kita perlukan adalah memperlakukan alam sebagai makhluk hidup kembali—Halo tanah, halo pohon, halo matahari, halo semut, halo ngengat, halo hantu-hantu, halo rumput, halo gunung, halo udara, halo semuanyaaaa!~

Hari itu, di perjalanan pulang dari hutan saya bertemu satu pohon raksasa—yang karena penyakit *bio-blindness* ini—yang entah apa jenisnya. Saya memanggilnya pohon *nene*, karena ia besar dan terlihat teduh sekali, seperti seorang nenek tua yang senantiasa memayungi anak dan cucu-cicitnya. Saya menghampirinya dan memeluknya sebisa saya.

Dalam waktu singkat itu, saya merasakan kulitnya yang keras

dan kokoh, membayangkan apa saja yang ia rekam dalam lapis-lapis kambi-umnya, mencoba menghitung seberapa banyak hewan dan tumbuhan lain yang bergantung hidup padanya, membayangkan kemana saja akarnya berjejaring di bawah tanah, hantu apa saja yang berteduh di kanopinya, juga kebijakan macam apa yang ia simpan dalam sunyinya yang begitu hidup.

Lalu, tiba-tiba saya teringat cerita soal Siddharta Gautama yang mengalami pencerahan setelah ia melakukan samādhi di bawah pohon Bodhi. Tiba-tiba cerita itu masuk akal belaka. Saat kita belajar mengalami alam semesta sebagai sesuatu yang amat hidup, ia pun senantiasa bicara pada kita:

*Under a tree was
the great Sage
Buddha born,*

*Under a tree, he
overcame passion,*

*And attained
enlightenment*

*Under two trees did
he pass in Nirvana.*

– Dalai Lama

Siasat Nenek Moyang yang Ditinggalkan di Negeri Gempa

OLEH ANEU DAMAYANTI

Menjelang akhir tahun 2009, tepatnya di bulan September, ada satu pengalaman bencana alam yang cukup melekat di ingatan. Saat itu saya masih kelas 2 SD dan sedang *ngabur* di teras masjid di sore hari menunggu buka puasa. Di tengah perbincangan saya dan tetangga, tiba-tiba beliau meneriakkan bahwa toren air berguncang-guncang sampai airnya terciprat keluar. Setelah sepersekian detik memproses mengapa, akhirnya kami menyadari bahwa saat itu sedang

terjadi gempa yang cukup hebat, berkekuatan 7,0 magnitudo. Saya langsung berlari ke tengah teras yang jauh dari tiang-tiang, orang-orang sekitar masjid pun berlarian keluar rumah mereka dan berkumpul di pekarangan. Setelah gempa selesai, saya melihat banyak sekali retakan pada tembok masjid, begitu pun rumah tetangga saya.

Saya pun berjalan pulang ke rumah untuk memeriksa, mempersiapkan kemungkinan terburuk bahwa



rumah saya mungkin saja roboh karena memiliki rumah panggung, “tetangga yang rumahnya tembok pun pada retak, apalagi rumah saya yang hanya rumah panggung.” Di luar dugaan, ternyata rumah saya baik-baik saja, tidak ada perubahan, dan masih berdiri. Setelah saya mempelajari belakangan ini, ternyata bangunan rumah panggung adalah salah satu cara leluhur kita dalam menyasiasi terjadinya gempa. Penemuan ini membawa saya pada pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan erat antara Indonesia dan gempa bumi, cara preventif leluhur kita menyelamatkan rumah dari gempa, dan bagaimana usaha preventif leluhur mulai ditinggalkan.

Indonesia dan gempa bumi seakan menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kita telah menyadari secara teoritis bahwa hampir seluruh wilayah di negara ini memiliki potensi tinggi terkena gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh posisinya yang berada

di pertemuan tiga lempeng utama dunia yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, yang dikenal dengan istilah Jalur Cincin Api Pasifik. Kondisi geografis ini membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terhadap bencana gempa bumi.

Dengan pemahaman mengenai kondisi alam Indonesia, leluhur kita ternyata menyasiasinya dengan konstruksi rumah panggung untuk mengamankan rumah mereka. Pakar geologi Teuku Abdullah Sanny menjelaskan bahwa konsep rumah panggung pada bangunan dapat membantu melepaskan energi gempa sehingga tidak getaran tidak langsung menghantam lantai bangunan (Nugroho, 2019). Ketika terkena



getaran, bangunan rumah panggung beresonansi dengan frekuensi alami bumi, sehingga lebih fleksibel dibandingkan dengan bangunan yang terbuat dari tembok. Selain itu, rumah yang dibangun langsung di tanah tanpa panggung akan menerima energi gempa secara langsung, sehingga lebih berisiko dibandingkan rumah panggung.

Selain itu, rumah panggung yang terbuat dari kayu, rotan, atau bambu lebih fleksibel dalam mengikuti getaran, sehingga dapat meminimalkan kerusakan dan korban jiwa. Sebaliknya, bangunan yang dibangun dengan tembok tanpa memperhatikan kekokohan dan kemampuan menahan guncangan gempa akan menyebabkan lebih banyak korban jiwa akibat reruntuhannya.

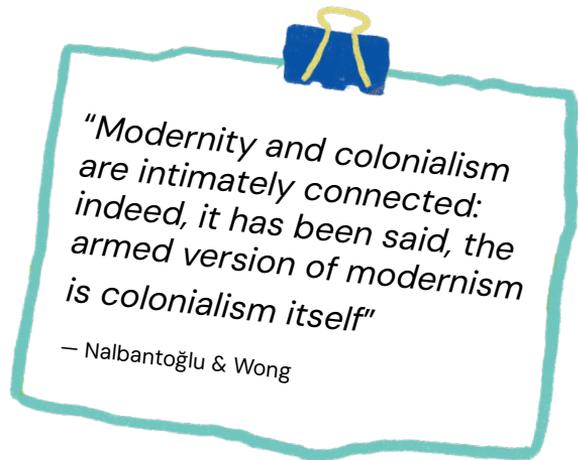
Jika menilik sejarah, ada masa transisi di mana gaya bangunan nusantara banyak mengalami perubahan. Perubahan bentuk dan gaya dalam bidang arsitektur dipengaruhi oleh penemuan baru di bidang teknologi dan perubahan sosial pada masa kolonialisme. Pada awal abad ke-20, beberapa teori desain, gaya arsitektur, dan apa yang dikenal sebagai "school" muncul di Eropa dan Amerika. Teori-teori ini sangat terkenal di Belanda dan menyebar ke negara-negara koloninya melalui publikasi, karena kemajuan pelayaran dengan kapal uap yang memperpendek jarak antara Eropa dan negara-negara lain (Abdul, 2015).



Sehingga, modernisasi bentuk bangunan rumah dan arsitektur di Indonesia erat hubungannya dengan kolonialisme Belanda. Bangunan bertembok dianggap lebih bergengsi oleh masyarakat kolonial karena dipengaruhi oleh gaya arsitektur Eropa yang mewah dan kuat. Kolonialisme mengubah cara pandang masyarakat lokal terhadap bangunan, di mana rumah berdinding dianggap sebagai simbol kemajuan dan status sosial yang tinggi. Pengaruh kolonial memperkenalkan konsep kemewahan dan modernitas yang berbeda dengan konstruksi tradisional rumah panggung. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih membangun rumah tembok, padahal rumah panggung lebih sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Rumah panggung pun ditinggalkan karena dianggap kurang bergengsi dibanding rumah tembok yang dianggap lebih modern dan mewah.



Menelusuri kembali pengalaman saya tentang gempa bumi dan rumah panggung menyadarkan saya bahwa ilmu yang aplikatif tidak selalu datang dari Barat; terkadang, pendekatan Barat mengabaikan konteks lokalitas yang sangat penting. Saya berharap prinsip-prinsip desain rumah tradisional dapat diintegrasikan ke dalam arsitektur modern, sehingga menghasilkan bangunan yang tidak hanya tahan lama dan tahan gempa, tetapi juga selaras dengan iklim dan kondisi geografis Indonesia.



REFERENSI

Abdul, N. N. (2015). "Pengaruh Arsitektur Kolonial terhadap Rumah Panggung Era Tahun 1890-an sampai Tahun 1930-an di Gorontalo," Jurnal Teknik Arsitektur Universitas Negeri Gorontalo.

Jay, M.. "Rumah tahan gempa sebagai kearifan lokal leluhur," Koran Sulindo, 4 Desember 2022. Diakses pada 16 Juni 2024, <https://koransulindo.com/rumah-tahan-gempa-sebagai-kearifan-lokal-leluhur/#:~:text=Secara%20umum%20konstruksi%20bangunan%20adat,yang%20tingginya%20sekitar%2060%20centimeter.>

Nalbantoğlu, G. B., & Wong, C. T. (1997). Postcolonial Space(s). Princeton Architectural Press.

Nugroho, J.. "Menurut pakar ini manfaat rumah panggung terkait gempa bumi," Antara News Sumbar, 18 Januari 2019. Diakses pada 16 Juni 2024, <https://sumbar.antaranews.com/berita/240499/menurut-pakar-ini-manfaat-rumah-panggung-terkait-gempa-bumi>



Depok Kota Petir

OLEH
TELIANA JUWITA

Kota Depok selalu menjadi magnet *clickbait* setiap berita online, seolah berita apapun bisa meledak asal ada kata “Depok” dalam judulnya. Depok seakan jadi kota absurd karena segala hal aneh kerap terjadi di Depok, mulai dari munculnya babi ngepet, begal, Musadeq mengaku jadi nabi, sampai berita covid pertama ada di Depok. Kalau dilansir dari website resmi pemerintah Kota Depok, kota ini punya luas wilayah sekitar 200,29 kilometer persegi, tapi mampu menampung sekiranya 1,8 juta jiwa di dalamnya. Depok jadi kota paling muda di Jawa Barat sekaligus si paling absurd. Bahkan absurdnya kota ini dirangkum pada sebuah meme timeline sejarah Depok di platform X.

Kadang saya selalu bertanya, jati diri Kota Depok yang saya tinggali sedari lahir ini sebenarnya apa, sih? Dapat julukan kota satelit, tapi ikon kotanya belimbing, jadi saya merasa *rada kurang aja gitu*. Jati dirinya ini kurang berani dan kurang keliatan, tidak seperti kota tetangganya yang blak-blakan bilang ‘Kota Hujan’. Depok ini seharusnya punya ciri khas yang bisa ditonjolkan. Sebagai Kota Petir, misalnya. Lewat tulisan ini, saya mencoba menggali jati diri Depok yang sebenarnya dan perlu diketahui orang-orang.

Timeline sejarah Depok 1992 - 2021

1992:
Ayu Ting Ting lahir

1993:
Kemunculan pocong

1994:
Kuntianak pohon nangka

1995:
Pembangunan fasilitas roket nuklir (ternyata tower masjid kubah mas)

1997:
Tuyul

1999:
Depok memisahkan diri dr Bogor

2003:
Vampir

2004:
Kolor ijo

2008:
Babi ngepet

2012:
Kelahiran begal

2016:
Musadeq ngaku nabi

2017:
Keranda terbang

2019:
Winardi mengaku Imam Mahdi

2020:
Kasus covid pertama

2021:
Babi ngepet reborn

MENGAPA PETIR?

Kalau kita sempatkan untuk melakukan pencarian di google dengan kata kunci “Depok kota Petir,” akan muncul tajuk-tajuk berita yang bikin takjub. Salah satunya dari depok.iNews: “Depok Kota Petir Terganas di Dunia”. Ini bukan berita kaleng-kaleng dan asal *click-bait* belaka. Depok bahkan tercatat di Guinness Book Of World Record sebagai kota dengan petir terganas di dunia (Good News from Indonesia, 2019).

Usut punya usut, fenomena petir ini sebetulnya sudah diteliti sejak tahun 2002 oleh Prof. Dr. Ir. Dipl. Ing. Reynaldo Zoro dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Penelitian Zoro menyimpulkan kalau petir yang ada di Kota Depok

memiliki arus petir negatif berkekuatan 379,2 KA (Kilo Ampere) dan petir positif mencapai 441,1 KA. Sebagai gambaran, dengan arus sebesar itu, arus petir di Kota Depok bisa saja meratakan bangunan gedung yang terbuat dari beton sekalipun. Ganas sekali petir di Kota Depok, bukan?

Masih menurut penelitian yang dilakukan oleh Zoro, faktor terjadinya petir dengan tegangan tinggi ini dipengaruhi oleh angin dari lembah dan gunung dari Bukit Barisan, serta angin lokal dari darat dan laut Kepulauan Riau dan Selat Malaka. Selain itu, kandungan besi di tanah Depok terbilang tinggi.

Perlu digaris bawahi kalau tujuan saya menulis ini bukan bertujuan untuk menakut-nakuti atau membuat risau warga Depok dan sekitarnya. Saya ingin membawa kesadaran bersama, bahwa penting sekali untuk sama-sama mengetahui risiko dahsyatnya petir di Kota Depok. Kalau dipikirkan, meski petir memang tidak datang setiap hari di Depok, mengapa orang-orang perlu tahu risiko petir?

Belum lama ini, sambaran petir terjadi lagi. Sebuah rumah di Kecamatan Sawangan tersambar petir pada April 2024 lalu. Walau beruntungnya tidak ada yang terluka, namun pemilik rumah yang sudah berusia lanjut harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami syok. Kejadian tersambar petir bukan hal baru di Kota Depok, ini merupakan siklus bencana yang berulang. Pada April 2014 silam, sambaran petir di Kota Depok

bahkan telah menelan korban jiwa. Dilansir dari sindonews.com, terdapat tiga warga Depok yang terjungkal akibat sambaran petir saat sedang berteduh di dekat TPU Kalimulya. Satu dari tiga korban tersebut meninggal dunia saat kejadian, sedangkan yang lainnya mendapat perawatan intensif.

Melihat betapa berbahayanya fenomena ini, siklus bencana dan pemahaman mitigasi bencana ini perlu untuk diturunkan antar generasi di Kota Depok, khususnya mengingat tidak semua orang punya informasi yang sama mengenai hebatnya petir di Kota Depok. Selain warga Depok sendiri, para pendatang yang tinggal sementara di Depok juga perlu tahu. Dari sini muncul pertanyaan: Lalu, tugas siapakah ini? Tanggung jawab siapa?

Menurut saya, semua pihak punya peran yang sama pentingnya dalam hal mitigasi dan meningkatkan kesadaran akan adanya siklus bencana supaya tidak ada lagi kerugian bahkan korban jiwa akibat sambaran petir di Kota Depok. Ada kutipan menarik dari Ahmad Arif seorang Jurnalis Bencana dan Krisis, ia bilang *"Bukan gempa bumi dan tsunami yang membunuh. Tapi ketidaktahuan dan sikap tidak peduli kita"*. Apa yang dibilang Ahmad Arif menarik, karena yang perlu dibenahi adalah pengetahuan dan sikap kepedulian kita.

Pemerintah kota seharusnya bisa saja dengan berani bilang kalau Depok Kota Petir, supaya semua orang sadar bahwa petir di Depok ini memang bukan main ganasnya. Ya, walaupun sebetulnya

memang kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada peran pemerintah. Maka dari itu masyarakat juga punya peran yang penting untuk melakukan mitigasi dari sambaran petir. Misalnya saja sesederhana memberitahukan informasi ini di dalam keluarga tentang pentingnya melindungi diri saat hujan lebat disertai petir terjadi. Pengetahuan siklus bencana ini jadi hal yang ingin saya tekankan juga dalam tulisan ini. Karena tulisan ini pun dibuat dengan tujuan memberikan kesadaran.

BERGURU DARI PONDOK PETIR

Ada salah satu kelurahan di Kota Depok yang bernama Pondok Petir. Asal-usul namanya masih simpang siur sebetulnya. Ada yang bilang karena dulu saat zaman Belanda di daerah tersebut banyak tumbuh pohon petir, tapi ada juga yang mengatakan karena sambaran petir di daerah tersebut makanya dinamakan pondok petir. Saya tidak ingin memperdebatkan asal-usul nama kelurahan ini sebenarnya, saya ingin berguru dari Kelurahan Pondok Petir ini.

Kita bisa belajar bagaimana siklus bencana antar generasi di salah satu kelurahan di Kota Depok ini bisa diturunkan melalui cerita kearifan lokal. Disana ada nasihat turun temurun yang selalu disampaikan ketika hujan turun. Seperti segera masuk rumah, jika berteduh di bawah pohon tidak boleh memegang pohon tersebut. Bahkan ketika di dalam rumah pun harus menaikan kaki ke atas kursi, tidak membiarkan terjantai ke bawah.



Nasihat ini terus disampaikan dan menjadi usaha dalam mitigasi terjadi hal-hal tidak diinginkan. Saya rasa seharusnya nasihat ini perlu didengar dan dilakukan seantero Kota Depok.

Jadi, setelah selesai membaca tulisan ini apakah kamu setuju kalau jati diri Kota Depok itu Kota Petir?

REFERENSI

"Petir Terganas di Dunia Berada di Kota Depok, yang Terparah Terjadi Pada Bulan ini," Grid.id. 28 Februari 2019. Diakses pada 20 Juli 2024,

<https://www.grid.id/read/041651841/petir-terganas-di-dunia-berada-di-kota-depok-yang-terparah-terjadi-pada-bulan-ini?page=all>

"Shaking The Disaster Literacy Ground | Ahmad Arif | TEDxJakarta." TEDx Jakarta. 7 Desember 2019. Diakses pada 14 Juli 2024, <https://youtu.be/0fhBEcJJP90?si=I4Td2boCibeMtO5a>

Oktaliani, Kiki. "Menguak Misteri Asal-usul Nama Pondok Petir di Depok," Okezone.com, 17 Mei 2023. Diakses pada 20 Juli 2024, <https://travel.okezone.com/read/2023/05/17/406/2814007/menguak-misteri-asal-usul-nama-pondok-petir-di-depok>

Portal Resmi Pemerintah Kota Depok. Diakses pada 14 Juli 2024, <https://www.depok.go.id/>

Purnama, Ratna. "Warga Depok tewas tersambar petir," Sindonews, 24 April 2014. Diakses pada 14 Juli 2024, <https://metro.sindonews.com/berita/857377/31/warga-depok-tewas-tersambar-petir>

Puji, Atika. "Petir di Depok Masuk Buku Rekor Dunia. Kok Bisa?" Good News from Indonesia, 02 Juli 2019. Diakses 14 Juli 2024, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/07/02/petir-di-depok-masuk-buku-rekor-dunia-kok-bisa>

Rachmad, Reza. "Depok Kota Petir Terganas di Dunia, Ini Penyebabnya," depok.inews.id, 10 Mei 2023. Diakses 14 Juli 2024, <https://depok.inews.id/read/294007/depok-kota-petir-terganas-di-dunia-ini-penyebabnya>

Ramdhani, Jabbar. "Rumah Tersambar Petir, Lansia di Sawangan Depok Dilarikan ke RS," Detik.com, 20 April 2024. Diakses 14 Juli 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7301263/rumah-tersambar-petir-lansia-di-sawangan-depok-dilarikan-ke-rs>

Mencegah Potensi Bencana dengan Pariwisata Berkelanjutan

OLEH NAFILAH SAFITRI

Pasca situasi pandemi COVID-19 mereda, animo masyarakat untuk bepergian dan berekreasi kembali naik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga menjadi fenomena global. Ditambah lagi dengan banyaknya *travel influencer* yang semakin membuka informasi tentang tempat-tempat indah, unik, dan menarik yang bisa dikunjungi untuk berwisata, lengkap dengan informasi pembiayaannya.

Namun, meredanya pandemi COVID-19 kembali membangunkan raksasa tidur bernama *overtourism*. Meski belum ada indikator tunggal untuk menyatakan suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai *overtourism* (pariwisata berlebihan), menurut Irvan Maulana (Kompas.com, 2023), Direktur





Center of Economics and Social Innovation Studies (CESIS), *overtourism* terjadi ketika jumlah wisatawan yang datang ke suatu tempat melebihi kapasitas maksimum tempat tersebut. Tidak hanya bicara tentang indikator kuantitatif, menurut I Gede Pitana sebagai pengamat pariwisata sekaligus Guru Besar Ilmu Pariwisata Universitas Udayana Bali menyampaikan bahwa *overtourism* tidak hanya diukur dari jumlah wisatawan, “*Overtourism* indikatornya sangat kualitatif, di mana masyarakat lokal sudah merasa sangat terganggu dengan adanya wisatawan” (Kompas.com, 2024). *Overtourism* sendiri adalah bentuk dari pembangunan pariwisata yang tidak berkelanjutan.

Di Indonesia, gejala terjadinya *overtourism* rupanya juga sudah pernah menjangkit wilayah yang dipadati wisatawan seperti Bali. Bali pernah menyandang predikat *overtourism* pada Januari hingga November 2023 lalu berdasarkan laporan Dewan Perjalanan dan Wisata Dunia (WTTC) (Kompas.id, 2024). Namun menurut pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno pada April 2024 lalu, Bali sebagai pulau belum mengalami *overtourism*, sementara menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjokorda Bagus Pelayun, *overtourism* hanya terjadi di beberapa daerah tertentu (kompas.id, 2024), seperti Bali Selatan. Di Bali, infrastruktur pariwisata dan objek wisata terkenal yang terkonsentrasi di area selatan seperti Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, membuat turis memadati area tersebut. Sedangkan di area Bali utara, Bali timur, dan Bali barat kerap luput dari perhatian.

Guru Besar Bidang Ilmu Pariwisata Berbasis Lingkungan di Fakultas Udayana, I Nyoman Sunarta menyatakan, jika dilihat dari data kunjungan wisatawan ke Bali sebelum pandemi COVID-19 dan setelahnya, Bali sebagai destinasi sebenarnya belum dapat dikatakan *overtourism*. Namun, semakin luasnya mobilitas wisatawan dan Bergeraknya aktivitas pariwisata memicu kekhawatiran timbulnya gesekan antara wisatawan dan masyarakat lokal di Bali (Kompas.id, 2024). Lebih lanjut menurut hasil amatan Partha Adnyana, Ketua Bali Tourism Board (BTB) (Kompas.id, 2024), dampak negatif ini sudah dapat dilihat dari adanya peningkatan polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan harga properti, serta konflik antara wisatawan dan penduduk lokal atau antara masyarakat lokal dan pendatang yang mencari kerja atau penghasilan.

Keberadaan *overtourism* juga memunculkan ekonomi lokal yang terlalu bergantung pada sektor pariwisata (García-Buades et al., 2022). Seperti apa yang terjadi saat pandemi COVID-19, perekonomian di Bali sempat terpukul hebat. Pada 2023 lalu, tren pertumbuhan ekonomi provinsi Bali sudah mencapai 5 persen seperti sebelum pandemi, sementara pemulihan sektor pariwisata juga masih berlangsung (Kompas.id, 2024). Ada banyak restoran, rumah makan, dan penginapan yang terpaksa tutup karena tidak mampu membiayai kebutuhan operasional semasa pandemi COVID-19. Seba-

gian melakukan pemberhentian kerja terhadap pegawainya dan memberikan promo besar-besaran akibat sepi nya wisatawan. Belum lagi risiko pembangunan dan investasi besar-besaran yang dilakukan untuk memenuhi preferensi dan kebutuhan wisatawan justru mempersempit kepemilikan lahan penduduk lokal dan menyebabkan kemacetan, krisis air bersih, dan tidak jarang benturan-benturan terhadap sistem budaya lokal yang disebabkan oleh perilaku wisatawan terhadap situs-situs budaya yang ada di Bali.

Salah satu contoh nyata imbas dari pembangunan pariwisata yang tidak berkelanjutan ini adalah semakin parah nya kondisi kelangkaan air di wilayah Bali Selatan. Dalam liputan Deutsche Welle Indonesia, Dewie Anggraini, Fundraiser dan Communication Officer IDEP Selaras Alam, sebuah yayasan yang fokus terhadap pembangunan berkelanjutan di Bali, menyampaikan hasil risetnya bahwa terjadi eksploitasi air tanah berlebih di daerah-daerah yang dipadati perhotelan dan villa. Hal ini sejalan dengan temuan IDEP Foundation, di mana 65% air di Bali digunakan untuk kebutuhan pelayanan wisata. Di tahun 2018, populasi di Bali mencapai 4,2 juta penduduk sementara Pulau Dewata itu tercatat menerima 15,9 juta wisatawan domestik dan mancanegara. Imbasnya, ada defisit kebutuhan air sebesar 13,6%. IDEP mencatat kebutuhan air di Bali mencapai 5.454 juta meter kubik per tahun sementara

yang tersedia hanya 4.710 juta meter kubik per tahun (Detik.com, 2019).

Dengan adanya berbagai potensi bencana dan masalah tersebut, tentu hal ini memberikan kekhawatiran bagi penduduk lokal yang ruang publiknya semakin terpinggirkan oleh wisatawan. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan agar sektor pariwisata bisa berjalan

dan memberikan *win-win solution* bagi penduduk lokal juga wisatawan?

Merangkul dari beberapa sumber, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Hal ini tentunya membutuhkan kerja sama berbagai pihak baik dari pihak pemangku kepentingan, penduduk lokal, juga pengunjung.

DARI SISI PENGELOLA DAN KEBIJAKAN

01 **Menaikkan tarif wisata.** Menaikkan harga tiket dan penginapan mungkin terdengar merugikan bagi pengunjung wisata, namun di sisi lain ternyata dapat menekan angka kunjungan dengan tetap memberikan keuntungan lebih bagi pengelola wisata. Hal ini sudah dipraktikkan di Bhutan dengan tarif penginapan yang dikenakan minimal pada angka 2,8 juta rupiah per malam. Di Indonesia sendiri, praktik ini juga sudah dilakukan di Desa Nglanggeran, Yogyakarta. Tarif tiketnya naik, kunjungan berkurang, namun tarif pendapatan daerahnya juga naik. Destinasi wisata yang unik dan dikelola dengan baik, akan tetap menemukan pasarnya sendiri bahkan dengan kunjungan yang lebih berkualitas.

02 **Perumusan kebijakan pariwisata yang baik.** Dalam perumusan kebijakan pariwisata yang baik, pelibatan dan partisipasi masyarakat lokal sekitar daerah tujuan wisata tentu menjadi suatu keharusan. Pariwisata yang berkelanjutan adalah yang bisa memberikan keuntungan bersama baik bagi pengelola, masyarakat lokal, juga lingkungannya. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat lokal harus dilakukan untuk memahami konteks lokal dari area wisata.

03 **Penerapan ekowisata.** Ekowisata menjadikan alam sebagai tujuan utama untuk rekreasi. Tidak sekedar menjadi tujuan, ada pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaannya, serta ada proses edukasi terhadap wisatawan. Pengalaman dan proses edukasi dalam konsep ekowisata justru memberi pengetahuan baru bagi wisatawan untuk memiliki kesadaran menjaga alam atau wilayah konservasi yang dikunjunginya.

DARI SISI WISATAWAN

01 Turut Serta Menjaga Lingkungan. Menjaga lingkungan dapat diwujudkan salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Hal ini bisa kita sebut etika dasar ketika kita pergi kemanapun, namun sedihnya masih banyak wisatawan yang masih belum bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Sebagian bahkan seringkali membawa sampah ke gunung dan laut dan tidak membuangnya dengan bertanggung jawab.

02 Menjaga perilaku dan menghormati adat istiadat, serta budaya setempat. Setiap tujuan wisata dan daerah yang kita kunjungi memiliki nilai dan kearifan lokalnya masing-masing. Sebagai orang asing yang sedang berkunjung ke wilayah orang lain, kita dapat mencari tahu terlebih dahulu tentang tujuan wisata kita, termasuk mencari tahu sedikit banyak tentang adat budaya setempat. Kita juga dapat bertanya langsung ke pemandu wisata atau penduduk lokal berkaitan dengan peraturan dan adat budaya di tempat tujuan kita.

03 Mematuhi peraturan di tujuan wisata. Setiap tempat wisata memiliki peraturan yang bersifat umum dan khusus. Peraturan umum biasanya berisi etika dasar saat berada di ruang publik, sementara peraturan-peraturan khusus seringkali berkaitan dengan panduan dan risiko keamanan, baik itu bagi pengunjung, maupun lingkungan tempat wisata. Dengan mematuhi peraturan yang ada di tempat tujuan wisata kita, kita telah berpartisipasi untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar dari ancaman dan risiko keamanan yang disebabkan oleh kelalaian dan ketidakpatuhan kita sebagai pengunjung atau wisatawan.

04 Menggunakan layanan dengan bijak. Sebagai wisatawan, kita mungkin sudah membayar jasa seperti fasilitas penginapan yang memberikan layanan air dan listrik. Meskipun demikian, bukan berarti kita dapat menggunakan layanan tersebut seenaknya dengan tidak bertanggung jawab. Ada banyak wilayah yang mengalami krisis air akibat menjamurnya pembangunan penginapan dan villa baru untuk disewakan ke wisatawan. Dengan menggunakan fasilitas air dan listrik secara bijak, kita turut mendukung wisata berkelanjutan dari daerah tersebut.

Nah, itu dia upaya-upaya yang bisa dilakukan berbagai pihak untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Kita tentu ingin bersenang-senang dan memiliki pengalaman baru dengan mengunjungi berbagai tempat yang indah dan menarik, tapi akan menyedihkan bukan jika kita bersenang-senang di atas kerusakan alam dan membuat masyarakat lokal terusik?

REFERENSI

Deutsche Welle. (2019). 'Bali, Surga Wisata yang Kekurangan Air Bersih', Detik News, 3 Desember. Tersedia di <https://news.detik.com/dw/d-4808019/bali-surga-wisata-yang-kekurangan-air-bersih> (Diakses pada: 11 Agustus 2024).

García-Buades, M.E., García-Sastre, M.A. and Alemany-Hormaeche, M. (2022). "Effects of overtourism, local government, and tourist behavior on residents' perceptions in Alcúdia (Majorca, Spain)". *Journal of outdoor recreation and tourism*, 39, p.100499.

Maulana, I. (2023). 'Lindungi Bali dari Ancaman Overtourism', Kompas.com, 23 Maret. Tersedia di <https://travel.kompas.com/read/2023/03/23/090154327/lindungi-bali-dari-ancaman-overtourism> (Diakses pada: 9 Agustus 2024).

Pusparisa, Y.D.R. (2024). 'Bali Menyandang Predikat Overtourism', Kompas.id, 4 Januari. Tersedia di https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/03/bali-menyandang-predikat-overtourism?open_from=Search_Result_Page (Diakses pada: 11 Agustus 2024).

Putra, C.Y.M. (2024). 'Bali Selatan yang Mulai Kewalahan Menjamu Wisatawan', Kompas.id, 11 Mei. Tersedia di <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/11/bali-selatan-yang-mulai-kewalahan-menjamu-wisatawan> (Diakses pada: 11 Agustus 2024).

Putra, C.Y.M. (2024). 'Pertumbuhan Ekonomi Bali 2023 Kembali Lampau Nasional', Kompas.id, 5 Februari. Tersedia di <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/05/pertumbuhan-ekonomi-bali-2023-kembali-lampau-nasional> (Diakses pada: 11 Agustus 2024).

Tiofani, K. dan Widyanti, N.N.W. (2024). 'Apa itu Overtourism dan Penyebabnya?', Kompas.com, 17 Februari. Tersedia di: <https://travel.kompas.com/read/2024/02/17/191332827/apa-itu-overtourism-dan-penyebabnya> (Diakses pada: 17 Juli 2024).



Seusai Bencana, Seuntai Upaya

OLEH DOMI DJAGA

Untuk merefleksikan dan mengawetkan peristiwa Tsunami Maumere 1992, komunitas KAHE bekerja sama dengan Teater Garasi/Garasi Performance Institute dari sebuah kreativitas penciptaan karya seni untuk sebuah pembenahan dan pemahaman dari sebuah peristiwa bersejarah. Dari hasil dari kolaborasi

juga analisis dan refleksi kolektif pada tahun 2018 tersebut, terbitlah sebuah buku dengan judul “Tsunami! Tsunami!” yang menampung sejumlah karya berarti berupa esai, puisi, dan cerpen.

Tsunami dihadirkan sebagai memori dan metafora dalam buku ini. Sebagai sebuah *memoria passionis* (ingatan

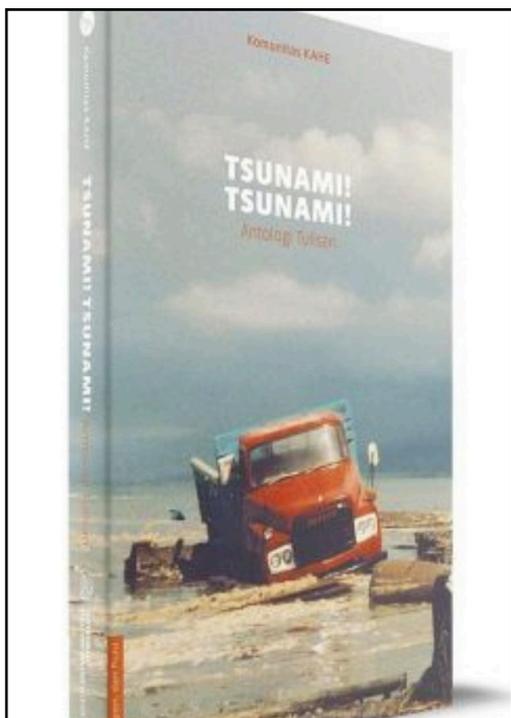


Foto buku "Tsunami! Tsunami!"

akan sebuah penderitaan), tragedi ini memang cenderung memicu ketakutan dan trauma. Namun, di balik itu kita juga bisa menemukan nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan, untuk menjadi sebuah introspeksi dan refleksi agar menjadi aksi pembenahan dan pembelajaran di masa depan. Karena di samping penjelasan ilmiah untuk menafsir peristiwa ini, masyarakat Flores pada umumnya juga memiliki tafsiran adat, di mana tafsiran tersebut memiliki muatan spiritual tentang kehadiran entitas tertinggi seperti "Lera Wulan Tana Ekan" untuk masyarakat Lamaholot, atau "Ina Nian Tana, Ama Lero Wulan" untuk masyarakat Maumere sendiri. Entitas Ini memiliki posisi spiritual sebagai pencipta, yang menaungi dan memelihara kehidupan

manusia. Keberadaan entitas ini disimbolkan dengan dengan citra sebagai matahari, hutan, bulan yang memelihara dan melindungi manusia. Bencana yang dialami, dimaknai sebagai sebuah teguran atas ketamakan dan kelalaian manusia. Sedangkan, tsunami sebagai metafora digunakan untuk mendekati dua hal, yaitu perubahan dan ancaman. Metafora ini diperlukan karena selain pertimbangan pembangunan infrastruktur maupun ekonomi, perlu juga ada pertimbangan ekologis serta sosio-kultural, terhadap manusia yang hidup dalam kelompok, atau manusia secara personal individu dalam pembenahan pasca bencana.

Pertimbangan ekologi perlu diperhatikan, karena dalam penelitian ilmiah atau pun biologis, kerusakan lingkungan juga berdampak pada peningkatan risiko bencana. Tingkat kerusakan alam juga menjadi penentu tinggi rendahnya risiko bencana terhadap suatu wilayah, terutama di negara kepulauan seperti di Indonesia. Hubungan antara tingkat kerusakan lingkungan dan risiko bencana ini terungkap dari World Risk Report (Laporan Risiko Dunia) yang diluncurkan oleh German Alliance For Development Works (Alliance), United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU_EHS) dan The Nature Conservancy (TNC) di Brussels Belgia pada tahun 2012. Dari laporan ini, Indonesia berada di peringkat ke-33 dengan nilai 10,74%. Meskipun begitu, Indonesia masih termasuk negara berisiko tinggi

terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, erosi, kenaikan air laut, abrasi pantai, dan badai.

Sebagai contoh, kerusakan alam seperti tanah longsor dapat disebabkan oleh penebangan pohon dengan skala besar yang dapat menyebabkan berkurangnya pepohonan terutama pada tebing-tebing curam, sehingga tidak dapat menahan tanah yang berada di kawasan tersebut. Banjir dapat terjadi akibat masalah sampah yang menumpuk serta kekurangan lahan resapan akibat penebangan hutan secara liar. Kemarau panjang, juga dapat disebabkan oleh tindakan pembakaran hutan yang dilakukan oleh manusia atau oleh para korporasi untuk keuntungan ekonomi. Di sisi lain, upaya restorasi lingkungan seperti perbaikan daerah pesisir pantai dengan menanam hutan mangrove juga batu karang dapat mengurangi risiko kerusakan bencana alam seperti tsunami. Sementara itu, pertimbangan secara sosio-kultural adalah terhadap masyarakat yang terdampak bencana atas luka trauma mereka. Selain itu, program relokasi untuk korban bencana di mana secara substansial tata ruang tidak bisa terlepas dari tata komunitas. Hal ini dibahas oleh Eka Putra Nggalu dalam esainya “Tsunami dan cerita-cerita kehilangan”. Dia mengatakan bahwa “relokasi tidak sebatas memindahkan orang-orang tetapi juga memindahkan kebu-

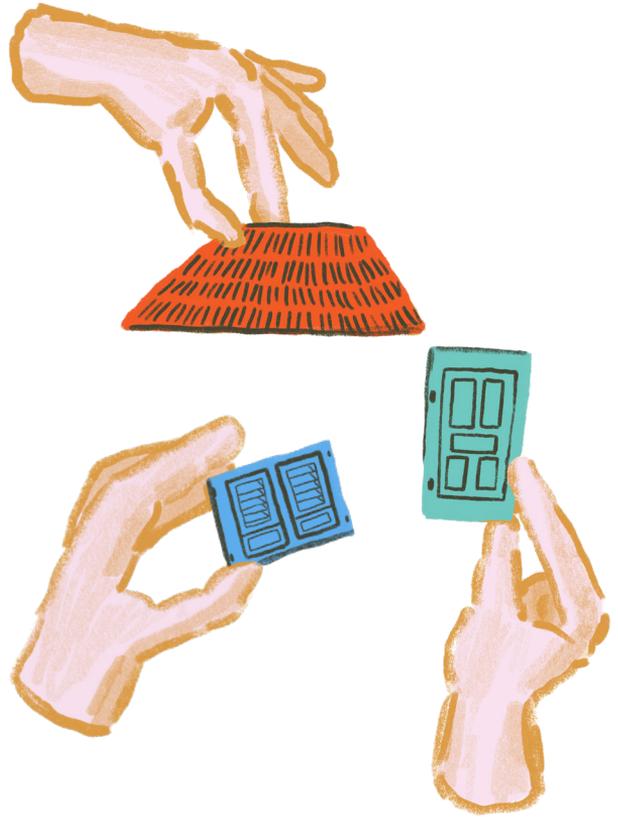
dayaan, memindahkan jalinan rumit rasa-merasa dan interaksi antar individu.” Selain itu, Pertimbangan kesehatan bagi para korban bencana dalam bingkai STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), pemerolehan air bersih, serta mata pencarian masyarakat yang mencari nafkah dari bertani dan melaut juga harus diperhatikan. Dan jauh sebelum itu, perlu diingat juga apakah pembukaan lahan untuk wilayah relokasi juga disertai dengan upaya reboisasi untuk meminimalisir penggundulan hutan? Dari peristiwa bencana ini, dalam kerja sama yang jujur dan tulus antar pemerintah dan masyarakat dalam pendampingan dan bantuan terhadap saudara kita yang terdampak bencana, ada proses belajar dan refleksi secara kolektif yang terjadi di dalam upaya kemanusiaan tersebut. Agar kita sama-sama menuju manusia sejati yang memiliki rasa kepedulian terhadap sesama kita, juga terhadap alam dan lingkungan hidup kita.

Tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini juga menyajikan refleksi dan analisis soal relokasi dan pembangunan pasca bencana. Selain membahas soal arah dan motivasi pembangunan yang tidak berbau KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), serta tidak adanya praktik promosi politik di tengah bencana untuk kepentingan elektoral, juga soal pembangunan yang mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diangkat oleh

Silvano Kheo Bhagi dalam tulisanya “Kemiskinan Struktural dan Koperasi di Flores dalam Terang Pemikiran D.N Aidit” yang mengkritisi peran koperasi yang belum sanggup membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Har Jansen dalam tulisanya “Politik pembangunan, Birokrasi, dan Etos Perlawanan” mengangkat soal pembangunan yang cenderung mengabaikan aspek kemanusiaan juga lingkungan hidup karena pemenuhan kebutuhan bagi para *bohir* atau pemilik modal. Untuk itu perlu adanya kehadiran kelompok-kelompok dan elemen-elemen kritis yang bersih dan kukuh agar membantu menciptakan pembangunan yang berorientasi keadilan sosial. Selain pembangunan dalam hal infrastruktur, hal yang diingatkan juga adalah perhatian terhadap aspek ekologis. Mikhael Jefrison Leo dalam tulisannya “Bram dan Kisah Terumbu Karang” mengungkapkan refleksi dari pengalamannya bertemu Oscar, seorang penyelam yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian terumbu karang di wilayah selatan Maumere.

MELIHAT KE DEPAN

Seperti yang disinggung di atas, hadirnya bencana alam berkaitan erat dengan parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi. Dan apa yang terjadi di NTT juga demikian. Dilansir dari *CNN Indonesia*, Direktur Eksekutif Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Nusa Tenggara Timur Uumbu Wulang T Paranggi mengatakan bahwa banjir



bandang dan longsor yang terjadi di 10 kabupaten/kota NTT juga dipicu oleh kerusakan lingkungan. Wulang menyebut kerusakan lingkungan tersebut disebabkan karena alih fungsi lahan, pertambangan, dan pembalakan liar. Sebelum bencana, kita juga sempat menerima berita soal upaya pembangunan atas nama kemajuan dan kesejahteraan, namun mengabaikan kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat kecil. Sebut saja seperti proyek Jurassic Park di Taman Nasional Komodo, pembangunan kota di pantai-pantai Labuan Bajo, dan pembangunan area wisata 400 Ha di hutan, kawasan hulu Labuan Bajo. Proyek ini dikritik oleh para pegiat lingkungan karena tidak hanya berpotensi bagi kerusakan lingkungan,

tapi juga berpotensi menimbulkan konflik bagi masyarakat setempat.

Selepas bencana, kita berusaha untuk melakukan pembenahan dan perbaikan. Ada rencana peningkatan kesejahteraan yang dicanangkan. Kita mencoba memulihkan dan meningkatkan taraf ekonomi kita. Namun, kita tidak bisa menempatkan alam sebatas lumbung uang, melihat alam sebatas wujud materi yang bisa kita jahar dan rusak untuk mendapatkan keuntungan. Alam juga memiliki nilai sakral. Walaupun sudah mulai tergerus globalisasi dan kekuatan kapitalis, masyarakat adatlah yang memegang erat pandangan tersebut. Mantra yang diucapkan dalam seremonial-seremonial adat memiliki ungkapan persaudaraan dan penghormatan kepada alam yang telah memberi kehidupan kepada manusia. Namun, hal ini sulit untuk dilaksanakan di tengah merosotnya kepedulian manusia baik dalam tataran pemerintahan maupun masyarakat biasa.

Dilansir dari *Indonesiabaik.id*, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 telah terjadi 2.925 kejadian bencana alam yang didominasi dengan bencana alam hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan. Jika kita memandang rencana pembangunan kedepan, sebelum pembenahan

infrastruktur, harus ada perubahan sikap. Perubahan karakter harus ada setidaknya pada rasa kemanusiaan dan empati kita terhadap sesama, apalagi terhadap lingkungan. Bencana yang kita alami saat ini bukanlah yang terakhir, prediksi tentang kehadiran bencana di masa depan dengan tingkat kerusakan yang lebih tinggi sebaiknya menjadi perhatian manusia baik dalam tatanan global maupun lokal. Dalam buku "*The Uninhabitable Earth*" karya David Wallace-Wells, diprediksi, jika pengrusakan lingkungan terus dilakukan, maka potensi kerusakan akibat bencana alam akan semakin tinggi. Bencana tersebut berupa timbulnya wabah akibat perburuan hewan liar, peningkatan emisi karbon, krisis udara bersih, kadar gizi yang berkurang, serta konflik yang terjadi akibat kekurangan makanan. Korban dari penghancuran ini adalah masa depan anak-anak kehidupan masa depan mereka yang dirampas untuk keuntungan segelintir orang. Segelintir orang yang memperkaya diri dengan mengorbankan sebagian besar umat manusia dan kehancuran ekosistem.

Dilansir dari *Walhi.com*, ancaman terhadap lingkungan di Indonesia saat ini bukan hanya pandemi, tetapi juga makin mengguritanya rezim investasi. Ancaman pada lingkungan hidup yang masif bisa dilihat dalam catatan WALHI yang menyatakan bahwa sekitar 61,46% daratan dikuasai oleh korporasi sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan

dan migas. Ketimpangan yang tergolong sangat tinggi tersebut ditegaskan data rasio gini penguasaan lahan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 yang mencapai angka 0,68.31 Artinya, 1% penduduk Indonesia menguasai 68% lahan. Kerusakan lingkungan masih terus terjadi. Ini adalah fakta yang harus menjadi perhatian.

Kiat-kiat perjuangan lingkungan memang sedang gencar dilakukan baik secara personal maupun dalam gerakan organisasi atau komunitas yang menaruh perhatian pada kelestarian planet ini. Gerakan-gerakan ini harus membangun kesadaran masal, untuk menciptakan gerakan massif untuk pemeliharaan dan kelestarian lingkungan. Apa yang terjadi di masa depan, kita tentukan mulai dari hari ini. Kutipan dari Eric Weiner berikut menjadi pengingat yang baik:

Ketika pohon terakhir ditebang,
Ketika sungai terakhir dikosongkan,
Ketika ikan terakhir ditangkap,
Barulah manusia akan
menyadari bahwa dia tidak
dapat memakan uang.

REFERENSI

“Walhi: Kerusakan Lingkungan Picu Banjir Bandang di NTT,” CNN Indonesia, 5 April 2021. Diakses pada 15 Juli 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210405124246-20-626052/walhi-kerusakan-lingkungan-picu-banjir-bandang-di-ntt>

“Bencana Alam di Indonesia Sepanjang 2020,” Indonesiabaik.id, 2021. Diakses pada Juni 2022, <https://indonesiabaik.id/infografis/bencana-alam-di-indonesia-sepanjang-2020>

“Lingkungan Hidup Terancam Rezim Investasi,” Walhi.com, 5 Juni 2020. Diakses pada Juni 2022, <https://www.walhi.or.id/lingkungan-hidup-terancam-rezim-investasi>

“Global Risks 2012,” World Economic Forum. Diakses pada Juni 2022, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2012.pdf

Walhi: Kerusakan Lingkungan Picu Banjir Bandang di NTT, 5 April 2021. Diakses pada Juni 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210405124246-20-626052/walhi-kerusakan-lingkungan-picu-banjir-bandang-di-ntt>

Memetakan Risiko Bencana, Bisa Mulai dari Mana?

OLEH FIRDAUS HR





Pada 28 April 2024 kemarin, seorang teman melakukan perjalanan dinas ke Manado. Di hari kedua dia di Manado, dari balik jendela kaca hotel tempat dia menginap, langit Manado di luar terlihat gelap pekat. Sementara waktu menunjukkan masih pukul delapan pagi. Gunung Ruang yang berjarak sekitar 109 kilometer dari Manado erupsi. Selain muntahan abu vulkanik yang menggelapkan langit, erupsi juga mengakibatkan beberapa kali gempa. Badan Geologi mengabarkan bahwa material erupsi gunung dan runtuhnya badan gunung yang berjatuh ke laut mengakibatkan adanya potensi tsunami. Teman

itu panik. Hotel tempat ia menginap tepat berada di kawasan pantai.

Saya yang berkorespondensi dengannya dari Jakarta tentu terbawa panik. Gunung erupsi, gempa bumi, dan tsunami berada di luar kontrol manusia. Dengan cara apa pun manusia tidak bisa membatalkan bencana alam. Hal yang bisa dilakukan adalah meminimalisir dampak dari bencana yang terjadi.

Meski pada akhirnya teman itu bisa kembali ke Jakarta dengan selamat, peristiwa itu membawa pelajaran penting tentang manajemen risiko dalam kerja-kerja organisasi. Dengan memahami dan mengelola risiko, organisasi dapat mengurangi potensi kerugian dan memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat. Berikut adalah tahapan membuat perencanaan mengelola risiko yang bisa dilakukan baik oleh individu maupun organisasi:

LANGKAH 1. MENGIDENTIFIKASI RISIKO

LANGKAH 1 MENGIDENTIFIKASI RISIKO	
BAHAYA	DAMPAK
Sesuatu yang berpotensi menimbulkan gangguan atau kerugian.	Dampak yang timbul dari bahaya.



Langkah pertama dalam membuat analisa risiko adalah mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin terjadi. Proses ini sangat penting karena menjadi dasar bagi seluruh upaya mitigasi dan pengelolaan risiko selanjutnya. Pada langkah ini, yang dipetakan adalah dua hal: bahaya dan dampak yang ditimbulkan.

Bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan gangguan atau kerugian. Sementara dampak mengacu pada konsekuensi atau akibat dari terjadinya bahaya. Baik bahaya atau pun dampak yang dipetakan bukan hanya bersifat fisik, seperti cedera atau kerusakan properti, tetapi bisa juga dampak atau bahaya yang nonfisik, seperti terganggunya emosional atau terganggunya hal yang telah direncanakan.

Untuk melihat apa saja faktor bahaya, kamu bisa mengecek aspek-aspek berikut:

- **Aspek Alam** seperti cuaca ekstrem, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau erupsi gunung berapi.
- **Aspek teknis** seperti, masalah dengan peralatan, atau gangguan sistem teknologi.
- **Aspek sosial** seperti isu-isu sensitif budaya, masalah keamanan peserta, dan kerentanan peserta.
- **Aspek hukum** seperti peraturan diskriminatif, pasar karet dalam UU dan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (living law).
- **Aspek Ekonomi** seperti fluktuasi biaya, perubahan dalam pendanaan, atau risiko keuangan lainnya.

CATATAN

Beberapa bahaya mungkin memiliki dampak yang berbeda pada orang dengan identitas tertentu. Misalnya, dalam sebuah kegiatan yang melibatkan peserta dengan disabilitas, bahaya seperti aksesibilitas fasilitas perlu diperhatikan secara khusus. Orang dengan identitas tertentu mungkin mengalami risiko yang berbeda dengan yang lain, dan ini harus dipertimbangkan dalam proses identifikasi risiko.



Ketika memetakan bahaya dan dampak yang mungkin terjadi, perhatikan dua hal ini supaya kualitas pemetaannya menjadi lebih baik. Yang pertama, libatkan tim atau orang lain untuk urun rembuk ide. Setiap anggota tim dapat memberikan perspektif yang berbeda berdasarkan pengalaman dan keahlian anggota tim. Hasil dari urun rembuk tim pasti lebih kaya daripada ketika melakukannya sendiri. Kedua, melihat kembali data historis dari kegiatan yang serupa. Temuan dari kegiatan yang sudah lalu dapat memberikan wawasan berharga tentang risiko yang mungkin muncul. Melihat data historis juga berarti melihat rekam sebuah tempat yang akan dituju. Bencana alam seperti cuaca ekstrem, banjir, maupun gempa bumi adalah bencana alam yang mempunyai siklus. Mempunyai pemahaman bahwa tempat yang dituju berada dalam siklus bencana membuat kita lebih siap mempersiapkan mitigasinya.

LANGKAH 2. PERHITUNGAN RISIKO

LANGKAH 2 PERHITUNGAN RISIKO		
Level Kemungkinan yang Terjadi	Level Dampak yang Ditimbulkan	Level Risiko

Setelah bahaya teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menghitung tingkat kemungkinan terjadinya bahaya dan tingkat dampak yang ditimbulkan dari bahaya. Kombinasi dari hasil melihat tingkat kemungkinan terjadi dan tingkat dampak bahaya adalah tingkat bahaya secara keseluruhan.

Tingkat bahaya bisa dibagi ke dalam lima tingkat berbeda: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

TABEL LEVEL RISIKO

PERHITUNGAN RISIKO		KEMUNGKINAN TERJADI				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah Tinggi	Sangat Rendah Tinggi
DAMPAK	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang
	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah

Tujuan dari memetakan tingkat risiko adalah supaya bahaya yang memiliki kemungkinan terjadi paling besar dan memiliki dampaknya paling serius, bisa mendapat perhatian lebih dibanding bahaya lain dengan tingkat yang lebih rendah.

LANGKAH 3. MENGELOLA RISIKO

LANGKAH 3 MENGELOLA RISIKO	
MITIGASI	RESPON
Tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya bahaya.	Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi bahaya.

Setelah risiko diidentifikasi dan dihitung, langkah berikutnya adalah mengelola risiko tersebut.

Mitigasi: Tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya bahaya. Berikan rincian tindakan pengendalian yang sudah ada atau yang sudah disepakati. Jika tindakan tersebut dijelaskan dalam dokumen lain, sebutkan lokasinya.

Respon Ketika bahaya sedang/sudah terjadi: Rincikan tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk mengatasi bahaya. Catat tindakan yang diperlukan dan siapa orang yang akan menjadi penanggung jawabnya.

Kamu bisa membuat
asesmen risiko mandiri
berdasarkan tahapan
di atas berdasarkan
template berikut:

bit.ly/Asesmenrisiko_Template

atau pindai QR Code berikut:



Profil Kontributor

Astried Permata, seorang perempuan yang lahir dan besar di Depok. Butuh waktu setidaknya satu bulan baginya untuk menghasilkan sebuah tulisan, yang sebenarnya lebih mirip ranting dan unek-unek di kepala. Saat ini, Aciety, begitu ia disapa, sedang sibuk mengeksplorasi hobi barunya di pelbagai cabor olahraga.

Dominiko Arianto Djaga, Lahir pada 27 November 2000. Ia menamatkan pendidikan di SMAK Seminari San Dominggo Hokeng pada tahun 2020. Pengalaman kesenian diperolehnya sejak masih di bangku SMA, ketika aktif dalam kelompok Teater Rakyat Sesado (TERAS). Di teater ini, ia menekuni bidang penulisan dan berhasil mengeluarkan beberapa naskah teater, di antaranya: Teater Wabah, Siapa yang Mati Hari Ini?, Surat Soekarno Kepada Guntur, dan Domi Djaga Sang Pendosa.

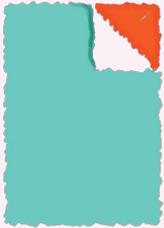
Setelah menamatkan pendidikan SMA, ia bersama beberapa teman mendirikan beberapa kelompok seni, yaitu: Teater Suara, Bengkel Sastra Smansa, dan COPA (sekarang dikenal sebagai Ukut Tawa). Selain menulis naskah, ia juga menciptakan karya teater dan film. Saat ini, ia sedang menekuni riset dan menjadi kurator pada beberapa event festival dan pameran, serta aktif di komunitas KAHE.

Nafilah Safitri, bagian dari generasi 'Zillennial'. Pekerja biasa yang senang bergelut di organisasi masyarakat sipil, pernah belajar ilmu hubungan internasional dan sempat bercita-cita ingin jadi member Sailormoon untuk mewujudkan perdamaian dunia meskipun ga akan kesampaian. Jadi sekarang sederhana saja inginnya, mau terus berkontribusi untuk mewujudkan dunia agar jadi lebih baik untuk ditinggali tanpa harus pakai kekuatan bulan.

Taufiqurahman Kifu (lahir di Palu, 1994) menggunakan medium film, drawing, fotografi, dan seni performans sebagai praktik artistiknya. Ia bekerja sebagai desainer grafis dan merupakan lulusan dari Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako. Ia turut menginisiasi kolektif seni FORUM SUDUTPANDANG (2016), komunitas film SINEKOCI (2018), dan kelompok belajar seni dan kota MUTUAL STUDY (2021). Tahun 2024 ia mengkurasi pameran dan residensi seni “Rasi Batu”. Sebelumnya ia menyutradarai film dokumenter “A Tale of the Crocodile’s Twin”, dan film eksperimental “ROTASI” yang telah dipresentasikan di berbagai festival film internasional.

Titah AW adalah jurnalis dan penulis lepas yang bekerja di berbagai platform. Banyak menulis reportase mendalam tentang isu-isu seputar ekologi, budaya, dan cerita realisme magis. Buku pertamanya “Parade Hantu Siang Bolong” yang dirilis Warning Book 2020 lalu menampilkan karya-karya pilihannya dalam benang merah tema mitos dan kearifan lokal.

Sejak tahun 2018, ia telah menjadi kontributor di beberapa media terkemuka di Indonesia seperti VICE Indonesia, Jakarta Post, Project Multatuli, Iklimku, dan National Geographic Indonesia.



PAMFLET

SIAPA KAMI

Perkumpulan Pamflet Generasi (Pamflet) adalah organisasi nirlaba yang dijalankan oleh dan untuk orang muda. Dengan mengedepankan interseksionalitas, inklusi, serta partisipasi orang muda bermakna dan kritis, kerja-kerja Pamflet mendorong orang muda untuk menikmati hak-hak asasi manusianya.

Pamflet didirikan dan juga dijalankan oleh anak muda yang berusia 16-30 tahun. Dengan tiga divisi utama: Youth Studies, Youth Movement, dan Youth Activism, kami bekerja untuk memperkuat akses anak muda terhadap informasi, sumber daya, dan jaringan yang terkait dengan hak asasi manusia. Pamflet juga aktif mendorong inisiatif anak muda lokal (individu/kolektif) di berbagai wilayah di Indonesia melalui kegiatan seperti penelitian, pengembangan kapasitas, pelatihan, kampanye kreatif, dan publikasi.

Temukan Kami di:

Situs web : www.pamflet.or.id

Instagram : [@pamfletgenerasi](https://www.instagram.com/pamfletgenerasi)

Facebook : [facebook.com/pamfletgen](https://www.facebook.com/pamfletgen)

Twitter : [@_pamflet](https://twitter.com/_pamflet)

Youtube : Pamflet Generasi

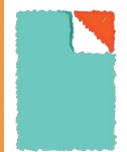
Surel : halo@pamflet.or.id







DITERBITKAN
OLEH:



PAMFLET